



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



ISRAN-HADI PAMITAN

BACA HALAMAN 2-5

**AKMAL MALIK
CALON TERKUAT
PJ GUBERNUR
PILIHAN MENDAGRI**



**PROGRAM KALTIM CORPU,
BPSDM LUNCURKAN
PORTAL DIGITAL KISS**

**KASUS TEWASNYA
BAYI TR DI BALIKPAPAN:
PENGASUH BAYI JADI
TERSANGKA
BACA HALAMAN 28**





Apel Pamitan dengan Haru

Pesan Isran Noor pada ASN: Selalu Bersyukur

SAMARINDA-Masa jabatan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi segera berakhir. Dalam momen terakhirnya, Gubernur Isran Noor memimpin Apel Gabungan bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur pada Senin (25/9/2023).

Gubernur Isran Noor menyampaikan amanat pamitan bersama Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi karena masa jabatan mereka akan berakhir pada 30 September 2023.

Ia mengucapkan permohonan maaf jika dalam menjalankan tugasnya selama ini ada yang merasa kurang puas atau tidak menyenangkan.





Isran Noor berharap Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur yang akan datang dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Ia juga meminta ASN untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, tanpa terlalu banyak memikirkan rezeki, dan selalu bersyukur atas posisi yang dimiliki.

"Kita harus bersyukur, insyaallah rezeki kita akan selalu berkah dan tidak akan pernah hilang," tambahnya. Gubernur Isran Noor juga mengajak ASN untuk bekerja dengan semangat dan bertanggung jawab, serta menghindari mencari kelemahan atau mencari aib orang lain.

PENUH KEHARUAN

Senin, (25/9/2023), menjadi hari penuh kenangan dan pengharuan bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, termasuk para pimpinan perangkat daerah dan biro yang hadir pada apel pagi.

Saat diminta tanggapannya terkait apel pagi pamitan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengaku tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan perasaannya. Ia merasa sangat terharu dengan momen tersebut.

Pemimpin yang selama ini telah memberikan bimbingan dan kepemimpinan harus berpisah karena berakhirnya masa tugas mereka. Wanita yang sebelumnya dipercayai sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini mengungkapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur selalu memimpin dengan hati dan meninggalkan kesan yang baik.

Keharuan juga dirasakan oleh seluruh pejabat, pimpinan perangkat daerah, hingga staf (ASN dan non ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Mereka mengakui bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur

telah memberikan banyak hal baik dan berkesan selama masa kepemimpinan mereka.

Banyak kebijakan yang dibuat oleh keduanya juga memberikan dampak positif kepada bawahan, termasuk dalam peningkatan gaji yang sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) serta program BPJS untuk tenaga honorer. Selain itu, terdapat program pro rakyat di bidang pendidikan, di mana guru swasta diberikan insentif yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Sekda Provinsi Kaltim mengungkapkan bahwa investasi jangka panjang juga dilakukan melalui program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (BKT) untuk pelajar dan mahasiswa Kaltim. Semua ini menunjukkan komitmen pemimpin yang selalu optimis, memiliki prasangka baik, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. (nta)



Pj Gubernur Kaltim Gantikan Isran Noor : Akmal Malik, Pilihan Terkuat Mendagri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri dikabarkan telah menunjuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menggantikan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, yang masa jabatannya berakhir pada akhir September 2023 mendatang.

Sumber dari Media Kaltim di Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penunjukkan Akmal Malik sudah dapat dianggap sebagai keputusan final. "Saya katakan hampir 200 persen, Pak Akmal yang ditetapkan sebagai Pj Gubernur Kaltim," ujar sumber dari Media Kaltim.

Hal ini juga diperkuat pernyataan Wakil Ketua DPD RI asal Kaltim, Mahyudin, kepada Media Kaltim pada Senin (25/9). "Saya mendengar bahwa Pak Akmal yang sudah ditunjuk. Namun, saya juga belum melihat Surat Keputusannya," kata Mahyudin.

Seperti diketahui, DPRD Kaltim telah mengirimkan lima nama sebagai usulan untuk Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim pada tanggal 8 September 2023 lalu.

Dari kelima nama yang diusulkan oleh DPRD Kaltim salah satunya adalah Dr. Akmal Malik, M.Si (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri). Sementara empat nama lainnya yakni Drs. H. Alimuddin, M.Si (Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara), Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama), Dr. Sri Wahyuni, M.PP (Sekwilprov Kaltim), dan Prof. Dr. Abdunnur, M.Si (Rektor Unmul).

Namun hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai siapa yang akan diangkat sebagai Pj Gubernur Kaltim untuk mengisi kekosongan jabatan setelah masa jabatan Isran-Hadi.

Terkait kabar penunjukan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengaku bahwa mereka belum menerima

kepastian mengenai siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim.

Hasanuddin menyatakan bahwa saat ini mereka masih menunggu keputusan dari Presiden RI yang akan dikeluarkan melalui Kementerian Dalam Negeri.

"Sampai saat ini kami juga masih belum menerima kabar lebih lanjut, jadi ini masih dalam tahap penantian," ungkap Hasanuddin setelah memimpin Rapat Paripurna pada Senin, 25 September 2023.

Namun demikian, ia, yang biasa disapa sebagai "Hamam," yakin bahwa akan ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait Penjabat Gubernur Kaltim ketika masa jabatan Isran-Hadi berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023 mendatang.

"Tanggal 2 Oktober, seharusnya sudah ada keputusan, karena jika

tanggal 1 Oktober jatuh pada hari Minggu, kita hanya tinggal menunggu surat dari Mendagri," tegas Politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, optimis bahwa Mendagri akan segera mengambil keputusan mengenai Penjabat Gubernur Kaltim dengan tepat waktu sehingga tidak akan ada kekosongan jabatan atau bahkan status quo.

"Saya yakin semua akan selesai tepat waktu, banyak yang memikirkan masalah ini. Tidak mungkin ada status quo, karena masih ada Sekretaris Daerah yang akan menjalankan pemerintahan," tegasnya.

Penulis: Andi Desky/Agus
Editor: Agus Susanto



Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik.



TENTANG Dr. AKMAL MALIK

NAMA:

Dr. Akmal Malik, M.Si.

LAHIR:

16 Maret 1970, Pulau Punjung, Sumatra Barat.

JABATAN SAAT INI:

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (sejak 9 September 2019). Pendidikan: Gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya (2021).

KARIER:

Pengalaman di berbagai posisi kunci di Kementerian Dalam Negeri, termasuk Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah.

PENGALAMAN GUBERNUR:

Berpengalaman sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (12 Mei 2022 - 12 Mei 2023).

KEPEMIMPINAN:

Dikenal sebagai pemimpin yang mampu mengelola otonomi daerah dan berperan aktif dalam pengembangan kebijakan yang mendukung kemajuan daerah dan masyarakat.

Sosok Akmal Malik, Calon Pj Gubernur Kaltim: Birokrat Berpengalaman yang Sukses Pimpin Sulawesi Barat

JAKARTA – Dr. Akmal Malik, M.Si., dikabarkan telah ditunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menggantikan Gubernur Kaltim Isran Noor. Lantas, siapa sebenarnya Akmal Malik?

Berdasarkan berbagai referensi yang dikumpulkan oleh Media Kaltim, Akmal adalah seorang birokrat yang lahir pada 16 Maret 1970 di Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatra Barat.

Akmal telah meraih banyak prestasi cemerlang dalam karier birokratisnya. Bahkan selama satu tahun terakhir, mulai 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023, Akmal dinilai sukses menjalankan amanah dari Mendagri sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Saat ini, Akmal masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, posisi yang telah diemban sejak 9 September 2019.

Akmal Malik memulai pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Pemer-

intahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor, di mana ia meraih gelar Diploma III pada tahun 1993.

Kemudian, ia melanjutkan studinya di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta, meraih gelar S-1 Manajemen Pembangunan pada tahun 1996.

Tidak berhenti di situ, Akmal kemudian menggapai gelar Magister Sains (S-2) dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Prestasi akademiknya tak berhenti di situ, pada tahun 2021, Akmal Malik meraih gelar Doktor Administrasi Publik dari Universitas Brawijaya.

Karier Akmal Malik dalam pelayanan publik juga mengukir banyak prestasi. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, ia telah memiliki pengalaman berharga dalam berbagai posisi kunci.

Pada tahun 2014, ia bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, di Subbag Kepegawaian pada Bagian

Perundang-Undangan dan Kepegawaian Setditjen Otonomi Daerah.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah dari tahun 2018 hingga 2019.

Tidak hanya dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik juga memiliki pengalaman sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Pada periode 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023, ia berhasil memimpin Sulawesi Barat dengan penuh dedikasi.

Sebagai seorang birokrat yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kuat, Dr. Akmal Malik dianggap sebagai pemimpin yang mampu menghadapi tantangan dalam mengelola otonomi daerah.

Selama masa jabatannya, ia telah berperan aktif dalam pengembangan dan implementasi kebijakan yang berdampak pada kemajuan daerah dan masyarakat. (MK)

Editor: Agus Susanto



GERAK CEPAT: Sekprov Kaltara, Dr H Suriansyah, M.AP memimpin apel pagi gabungan di Lapangan Agatis, Senin (25/9).

Ajak Gotong Royong di Tengah Musibah Banjir Malinau

TANJUNGSEROR-Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.AP, memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemprov Kaltara di Lapangan Agathis pada, Senin (25/9).

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov atas nama Pemprov Kaltara menyampaikan turut perihatin dengan terjadinya musibah banjir yang melanda sebagian wilayah di kabupaten Malinau dan Nunukan.

Dalam hal ini, Sekprov atas arahan Gubernur juga telah menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sama-sama membantu mereka yang terdampak banjir di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

"Sesuai arahan Gubernur sebagai bentuk kepedulian, kebersamaan,

dan jiwa gotong royong kita untuk menyumbangkan baik berupa material, pakaian, maupun bahan pangan," ujar Sekprov Suriansyah.

Dalam amanatnya, Sekprov juga menyampaikan terkait Peraturan Gubernur (Pergub) yang diterbitkan tahun 2021 tentang Penggunaan Batik Khas Kaltara dan Pemanfaatan Produk Pangan Lokal yang dapat menghidupkan perekonomian daerah. Demikian juga, dalam setiap kegiatan, diharapkan agar konsisten menggunakan atau memanfaatkan produk lokal.

"Saya mengajak kepada kita semua, rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah dan Biro, serta seluruh pegawai di Pemprov Kaltara untuk kita konsisten melaksanakan peraturan Gubernur tersebut, yaitu setiap tanggal 25 menggunakan pakaian batik khas Kaltara," imbuh Sekprov.

Kemudian, terkait realisasi APBD, ia berharap Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terus memacu kegiatan masing-masing sehingga target realisasi, baik fisik maupun keuangan, maksimal pada akhir tahun 2023.

"Tentu saja diharapkan berdampak positif, tidak hanya bagi perangkat daerah, tetapi juga kepada masyarakat agar bisa merasakan dampak dari penggunaan APBD kita," ujarnya.

"Di akhir amanatnya, Sekprov menyampaikan pembinaan PNS. Ia berharap kepada seluruh jajaran untuk melakukan pembinaan sesuai dengan jenjang dan hierarkinya.

"Saya meminta kepada rekan-rekan agar ketika melakukan kegiatan konsultasi, konsolidasi dilakukan secara berjenjang," tuntas Sekprov Kaltara. (dkisp)



STABILITAS PANGAN: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah oleh Mendagri, Senin (25/9).

Gubernur Kaltara Kawal Langsung Perkembangan Harga Beras di Daerah

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., pada Senin (25/09/2023) pagi secara daring.

Gubernur Zainal Paliwang mengawal langsung perkembangan harga komoditas pangan, khususnya beras, yang merangkak naik sejak awal September 2023.

Menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu ketiga bulan September 2023, tren harga beras semakin menunjukkan kenaikan harga, sementara terdapat potensi defisit produksi beras hingga November 2023.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasion-

al (Bapanas), Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M., menyebut bahwa tingginya harga beras dipengaruhi oleh tingginya harga Gabah Kering Pangan (GKP) di tingkat produsen.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, menjelaskan bahwa saat ini Bulog senantiasa menjaga stok pasokan di gudang seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing.

“Sesuai dengan instruksi Presiden, Mendagri Tito Karnavian mengajak Pemda untuk melanjutkan program bantuan pangan murah.

“Secepatnya Pemda terus merapat koordinasi dengan Bulog untuk memeriksa stok beras yang ada agar bisa digelontorkan kepada masyarakat,” ucap Tito Karnavian.

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dalam Rakornas kali ini menyampaikan langkah Provinsi Kaltara dalam

menghadapi harga komoditas pangan yang cenderung kurang stabil.

“Di Kaltara selalu kita gaungkan pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk ditanami komoditas pangan seperti cabai yang sampai saat ini tidak perlu meresahkan stok cabai lagi,” kata Zainal.

Moda transportasi menjadi tantangan fluktuasi harga pangan di Kaltara. Namun, Gubernur bersama Pemerintah Provinsi Kaltara berupaya memberikan subsidi moda transportasi angkutan barang dan orang agar ongkos distribusi dapat ditekan.

“Selain mengadakan pasar murah, kita berupaya bekerjasama dengan berbagai penyedia moda transportasi baik darat, laut, dan udara agar ongkos pengiriman barang atau orang bisa lebih terjangkau sehingga harga barang di pasar dan eceran jauh lebih murah,” tutup Zainal mengakhiri paparannya. (dkisp)



PROMOSI: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengikuti Super Long Run Borneo Nash Hash ke-19 di Kota Tarakan, Ahad (24/9).

Dukung Komunitas Hash Harriers Promosikan Pariwisata Kaltara

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal, ikut serta dalam acara Super Long Run Borneo Nash Hash Ke-19 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komunitas Hash House Harriers Provinsi Kaltara bersama Negara Bagian Sabah Malaysia, Ahad (24/9).

Dalam kegiatan trekking, turut serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan SE., M.Si., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara Obed Daniel L.T., S.Hut., M.M, DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris, dan Ketua Panitia, Alung Tjandra.

Gubernur Zainal mengucapkan selamat datang kepada peserta Long Run Borneo dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya even kolaborasi dua negara ini. Kegiatan

ini merupakan agenda rutin tahunan yang tahun ini diselenggarakan di daerah Bukit Mas.

“Saya yakin, kegiatan ini akan menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi antara anggota Komunitas Hash House Harriers dari berbagai daerah di Kalimantan. Selain itu, kegiatan ini juga akan menjadi sarana untuk mempromosikan Provinsi Kaltara sebagai destinasi wisata olahraga,” ujar Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.

Olahraga Hash sendiri sudah cukup lama dikenal dan digemari oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan terbentuknya banyak Komunitas Hash House Harriers di berbagai daerah di Indonesia.

Dikatakan Gubernur, bahwa olahraga Hash merupakan kegiatan olahraga

yang menggabungkan berjalan, berlari, dan tracking melintasi alam. Ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan alam sambil berolahraga, dan peserta diwajibkan untuk mengikuti rute atau trek yang telah disiapkan oleh panitia.

Ia pun berharap agar perlombaan ini berjalan lancar dan sukses, serta semua peserta dapat meraih hasil yang memuaskan.

“Saya ingin mengajak seluruh peserta perlombaan untuk turut mempromosikan keindahan alam dan budaya Kalimantan Utara. Mari kita jadikan perlombaan ini sebagai ajang untuk memperkenalkan Kalimantan Utara kepada masyarakat luas,” tutup Gubernur Kaltara. **(dkisp)**



PUNCAK ACARA: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengikuti Grand Party Borneo Nash Hash ke-19 di Hotel Tarakan Plaza, Ahad (24/9/) malam.

Puncak Borneo Nash Hash, Gubernur Ajak Peserta untuk Kembali Kunjungi Kaltara

TARAKAN—Setelah kegiatan lomba Long Run Borneo yang berlangsung di Daerah Bukit Mas, malam ini Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum, ikut serta dalam acara penutupan Grand Party Borneo Nash Hash ke-19 tahun 2023 di ruang auditorium Hotel Tarakan Plaza.

Adapun 'Even Grand Party' diselenggarakan oleh Komunitas Hash House Harriers Kaltara bekerja sama dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Turut hadir dalam acara diantaranya yakni, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara, Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara,

Obed Daniel L.T., S.Hut., M.M., DPRD Provinsi Kaltara, Norhayati Andris, dan Ketua Panitia, Alung Tjandra.

Gubernur Zainal sangat bersyukur acara tahun ini berlangsung meriah di kota Tarakan, sehingga dapat memperkenalkan budaya dan keindahan Kalimantan Utara, khususnya yang terdapat di kota Tarakan. Hal ini memungkinkan para Hasher, yang merupakan peserta kegiatan, untuk melihat dan menikmati sebelum kembali ke daerah asal.

"Kami berharap saudara-saudara semua dapat kembali lain waktu untuk mengunjungi tempat-tempat lain di Kaltara," ucap Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, Ahad (24/9/2023) malam.

Setelah bersama-sama melakukan olahraga Hash, kini berkumpul untuk bersilaturahmi sebagai Hasher. Saatnya istirahat dan menikmati waktu

bersama untuk merayakan keberhasilan penyelenggaraan event Borneo Nash Hash ke-19.

Jadikan waktu ini untuk berkenalan dengan para Hasher dari daerah lain, terutama Hasher pemula yang baru bergabung dengan komunitas di daerahnya. Jangan lupa juga membawa cinderamata khas Kaltara.

Tidak lupa juga, Gubernur Zainal mengingatkan bahwa saat event Borneo Nash Hash ke-20 diadakan kembali pada tahun 2025, semua Hasher yang menjadi peserta harus menjaga keeratatan tali persaudaraan.

"Jadi kami sangat berharap, saudara dapat kembali bahkan membawa keluarga, teman, atau rekan kerja untuk berkunjung dan berwisata di Kaltara. Pastinya, kami akan menyambut saudara semua dengan baik dan penuh keramahan," tutup Gubernur Zainal. (dkisp)



ISTIMEWA

Dalam pertemuan monitoring dihadiri oleh 62 orang terdiri dari dinas dan DPPM.

Keterlibatan Fasyankes Penting dalam Percepatan Layanan TB

BALIKPAPAN- Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini. Menurut WHO dalam Global TB Report tahun 2022, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India perkiraan sebesar 969.000 kasus.

Dibahas dalam pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM) tingkat provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada 25-27 September 2023.

Berdasarkan hasil capaian program tuberkulosis (TBC) di Indonesia hingga Desember tahun 2022 menunjukkan angka di bawah target program nasional.

Jumlah kasus yang diobati dan dilaporkan ke SITB tahun 2022 sebanyak 643.598 kasus dengan cakupan penemuan pengobatan sebesar 66,4 persen (target 90 persen) dan presen-

tase keberhasilan pengobatan TBC sebesar 82,9 persen (target 90%).

Sementara di Kaltim di tahun 2022 penemuan dan pengobatan TBC baru mencapai 55,6 persen dari target eliminasi kasus yang harus ditemukan sebanyak 14.442 kasus, dan treatment success rate baru mencapai 86,9 persen dengan kontribusi pelibatan fasyankes terbesar pada fasyankes pemerintah 80,2 persen, sedangkan fasyankes swasta dalam pelaporan kasus TBC untuk Rumah Sakit swasta 16,5 persen dan Klinik Swasta 0,3 persen. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi daerah dalam upaya pencapaian eliminasi di tahun 2030.

"Di Kaltim sendiri 9 kabupaten/kota yang sudah terbentuk tim DPPM, namun baru 2 kabupaten/kota yang telah aktif. Dan merupakan kabupaten/kota PPM yakni Kota Sa-

marinda dan Kota Balikpapan," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr Jaya Muallimin, pada Senin (25/9/2023).

Penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Publik-Private Mix/PPM) sangat diperlukan. District-based Public Private Mix (DPPM) merupakan jejaring layanan TB antara layanan TB antara fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta disuatu kabupaten/kota dibawah kordinasi Dinas Kesehatan setempat.

"Sehingga kegiatan ini dalam rangka evaluasi dan percepatan peningkatan keterlibatan fasyankes dalam jejaring PPM Kaltim, maka dilakukan pertemuan monitoring," tutupnya. (adv)

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari

Harapan Hidup Tinggi, Lansia Kaltim Tergolong Mandiri

SAMARINDA - Hal menarik disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kaltim, Nurhasanah pada Pelatihan pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri bagi tenaga kesehatan di puskesmas di meeting room Hotel Horison Samarinda baru-baru ini.

Menurut data dinkes Kaltim, Provinsi Kaltim mempunyai usia harapan hidup rata-rata mencapai diatas umur 60. Atau sekitar 74,89 persen secara nasional.

“Data itu tertinggi ketiga setelah DIY dan Jawa Tengah,” sebutnya. Untuk itulah pelayanan usia lansia sangat dibutuhkan, agar segmen ini bisa terus produktif.

“Sedangkan usia produktif di Kaltim rata-rata mencapai usia 60. Artinya masih banyak warga kaltim yang tetap aktif dan produktif diatas umur 60 tahun,” tambahnya.

Untuk tantangan kondisi kesehatan, Stroke dan hipertensi, masih menjadi 2 penyakit utama lansia di

kaltim.

“Termasuk didalamnya, status gizi, dan persoalan berat badan dan gangguan mental,” sebutnya.

Ia mencontohkan pasien lansia saat di periksa kerap mengatakan; tidak usah diperiksa nanti mati juga. “Artinya, itu menunjukkan ada kadar depresi disitu. Disinilah peran nakes diperlukan untuk lebih jauh menggali data kesehatan pasien lansia,” paparnya. (rs1/adv/dinkes)



ILUSTRASI

Proses home care dari nakes puskesmas.

Home Care Puskesmas Samarinda Tertinggi Se-Kaltim

SAMARINDA – Salah satu pelayanan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh puskesmas adalah layanan di rumah atau home care service.

Fakta menarik disampaikan pada pelatihan pelayanan kesehatan lanjut usia dan geriatri bagi tenaga kesehatan di puskesmas di meeting room Hotel Horison Samarinda baru-baru ini.

Secara umum, puskesmas di Samarinda pada program home care nya, mencapai 100 persen. Lebih tinggi dari Kubar dan Kutim.

“Artinya nakes puskesmas di Samarinda sudah menyadari pentingn-

ya program home care pada pasien lanjut usia (lansia),” ucap Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kaltim, Nurhasanah.

Meski begitu, disatu sisi kendala SDM nakes khusus perawatan kesehatan lansia, masih terbatas.

“Akan susah meraih tugas paripurna bila pelayanan lansia oleh tenaga perawat di Puskesmas, masih mengerjakan lebih dari satu tugas utama,” katanya.

Harus diakui, masih minimnya tenaga pelayanan kesehatan lansia dan geriatri adalah kendala utama layanan pasien lansia di Puskesmas.

Kalaupun ada, pengetahuan dan pemahaman akan tata cara melayani pasien lansia harus dipahami dan dikuasai. “Karena polanya berbeda dengan melayani pasien umum lainnya. Banyak hal yang harus dikuasai karena memberikan pelayanan kesehatan pada lansia, punya tantangan khusus yang butuh keahlian khusus,” bebarnya.

Ia menyarankan, bila telah memiliki tenaga khusus nakes pasien lansia, Puskesmas sebaiknya memiliki ruang khususnya. Tak hanya itu, programnya pun harus tidak monoton agar selalu menarik bagi pasien lansia. (rs1/adv/dinkes)



Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kaltim, Nurhasanah

Posyandu Menarik Itu Terprogram Kreatif

SAMARINDA – Pernah lihat posyandu yang sepi? Bisa jadi ada yang kurang pas dengan layanan, konsep dan info yang disebar.

Pasien lanjut usia, menjadi salah satu lini pasien yang kurang tertarik untuk mendatangi Posyandu dengan layanan yang monoton.

Bagaimana membuat posyandu menarik bagi semua pasien atau warga sekitar yang membutuhkan layanan kesehatan?

“Posyandu karu kreatif. Harus menarik dalam programnya. Jangan tawarkan hal yang itu-itu saja secara berulang,” ucap Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kaltim, Nurhasanah.

Ia mencontohkan program yang menarik itu misalkan mendatangkan konseling dan tenaga ahli kesehatan khusus dari Puskesmas atau Dinas

Kesehatan.

“Sesekali buat konseling dan memanggil tenaga ahli agar lebih mendalam dalam layanan. Warga dan pasien juga merasa lebih diperhatikan,” katanya.

Ia membeberkan, penyelenggara posyandu jangan khawatir bila nantinya program mendatangkan tenaga khusus itu bakal dipersulit.

“Ingat, tenaga medis itu juga wajib memberikan layanan kesehatan karena menjadi bagian dari program pengabdian di masyarakat. Mereka sudah paham itu dan pasti akan membantu,” ulasnya.

Hal menarik lainnya, adalah memanfaatkan momen rutinitas warga.

Misalnya menggelar posyandu bersamaan dengan program rutin senam sehat warga. Biasanya di hari libur sabtu atau minggu pagi.

Bisa juga posyandu digelar bersamaan dengan program pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter tertentu, bekerjasama dengan akademi kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sebagainya.

“Pengelola posyandu harus kreatif. Karena sasaran posyandu adalah layanan yang luas untuk warga sekitar,” tambahnya.

Ia bahkan memberi ide, konsep kolaborasi dengan kegiatan rutin warga seperti arisan atau pengajian mingguan yang dipadukan dengan kegiatan posyandu.

“Selain targetnya lebih kena, yang datang bisa lebih banyak karena bagi kebanyakan warga, memanfaatkan 1 momen untuk 2 kegiatan, adalah hal yang efektif,” tutupnya.

(rs1/adv/dinkes)

Kuatkan Jejaring PPM Guna Penanggulangan TBC

BALIKPAPAN-Guna meningkatkan kualitas pelayanan TB dan meningkatkan laporan hasil pengobatan, bentuk upaya percepatan eliminasi TBC tahun 2030 ditentukan pada kontribusi dan kolaborasi multipihak.

Hal ini dilaksanakan dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM). Pada Senin (25/9/2023) di Hotel Grand Senyur Klandasan Ulu, Balikpapan.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Kaltim) Dr Jaya Mualimin menyampaikan, dalam penguatan jejaring pelayanan harus melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Publik-private Mix/PPM).

"Dengan ini pertemuan monitoring dan evaluasi Public Private Mix (PPM) tingkat Provinsi Kaltim secara resmi dibuka," Ungkap Kadis Dinkes

Kaltim Dr Jaya Mualimin, dalam sambutannya, Senin (29/9/2023).

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap dalam fasyankes wajib terlibat didalam jejaring pelayanan TBC atau jejaring PPM untuk memberikan diagnosis dan pengobatan TBC sesuai standar serta wajib melakukan pencatatan dan pelaporan untuk semua kasus TBC yang ditemukan atau diobati fasyankes masing-masing.

"Penguatan jejaring District-based Public Private Mix (DPPM) TB, di mana merupakan jejaring layanan TB antara fasilitas layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta di suatu Kabupaten/Kota," katanya.

Lebih lanjut, upaya fasyankes dalam keterlibatan penanggulangan TB, tentunya membutuhkan dukungan dari Dinas Kesehatan, Fasyankes, Organisasi Profesi, ataupun komunitas yang menjadi mitra TB.

"Terutama Organisasi Profesi (KOPI TB/DPPM) yang menjadi salah satu komponen dari jejaring PPM, yang diharapkan dapat mendorong seluruh sejawatnya untuk mendukung program penanggulangan TB dengan notifikasi kasus TB melalui sistem informasi nasional dan menatalaksana kasus TB sesuai standar," tutupnya. (adv)

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



Salah satu operasional posyandu di Samarinda.

Posyandu, Bukan Tempat Berobat

SAMARINDA – Secara umum, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

Tetapi, kondisi dilapangan, dengan beragam alasan, pasien lanjut usia termasuk lansia rentan diatas 70 tahun, menjadikan Posyandu tempat berobat. "Usia lansia rentan atau usia diatas 70 tahun kerap meminta obat dan

berobat di posyandu. Alasannya mulai dari jarak ke puskesmas yang jauh, tak mau repot, menganggap layanan posyandu dan puskesmas sama saja dan lainnya," ucap Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kaltim, Nurhasanah.

Sayangnya, di beberapa posyandu pasien lansia ini dilayani dalam pemberian obat. "Padahal itu tidak dibolehkan. Posyandu bukanlah tempat berobat. Kecuali dalam kondisi tertentu," katanya.

Kondisi tertentu itu adalah, bila aktifitas posyandu disandingkan dengan dengan program puskesmas keliling (pusing).

Menurutnya, dengan memadukan pusing dan posyandu, aktifitas berobat bisa lebih optimal tanpa harus ke puskesmas. "Ini bisa diajukan oleh pengurus posyandu ke puskesmas terdekat. Untuk itulah sebaiknya posyandu digelar dilokasi yang berdekatan dengan puskesmas," jelasnya.

Pola lainnya, khusus pasien lansia, oleh posyandu diarahkan ke puskesmas atau melakukan perawatan di rumah (home care service). "Dengan home care, pasien lansia biasanya meranya lebih nyaman dalam proses layanan kesehatan dan pengobatan," tutupnya. (rs1/adv/dinkes)



ADHI/MEDIAKALTIM

Memahami kondisi lansia lewat skrining dan tanya jawab seputar kondisi kesehatan.

Nakes Wajib Pahami Latar Belakang Pasien Lansia

SAMARINDA – Pelayanan pasien lanjut usia lansia di Kaltim akan dikondisikan menjadi lebih optimal. Dinas Kesehatan Kaltim terus menggelar pelatihan bagi tenaga kesehatan garda depan atau di Puskesmas untuk pelayanan pasiennya.

Salah satu persoalan yang kerap ditemui di puskesmas adalah durasi pemeriksaan dan Skrining pasien lansia yang dianggap terlalu lama. “Memang masih menjadi kendala bersama. Tetapi segera kan diterapkan pola efektif sebagai solusinya,” Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kaltim, Nurhasanah.

Ia tak menampik, pemeriksaan kerap membuat proses pengkajian menjadi lama. Tentu hal ini berpengaruh pada kenyamanan pasien lan-

sia. “Secara usia mereka tak lagi bisa dimintai keterangan berlama-lama. Itulah mengapa layanan pasien lansia khusus di puskesmas, tidak menjadi pilihan utama pasien lansia,” tambahnya.

Kondisi yang juga wajib menjadi perhatian, bagaimana nakes merespons dalam memberikan pelayanan berdasarkan latar belakang pasien lansia.

Di Kaltim, menurutnya, tak sedikit lansia yang masih aktif dan memiliki peran penting dalam mengambil keputusan. Baik sebagai salah satu pemilik perusahaan, atau peran penting dalam keputusan dalam keluarga.

Peran lansia saat ini masih termasuk vital juga dalam lingkungan keluarga. Misalnya, sebagai pengasuh anak cucu). Atau memutuskan

hal penting dalam rembug keluarga. Makanya banyak keputusan genting masyarakat Indonesia, termasuk di Kaltim, masih bergantung keputusan orang tua.

“Pelayanan nakes pada pasien ini tak bisa bertele-tele. Karena secara pengalaman, mereka yang lama bekerja di sektor swasta, sangat akrab dengan pola profesional selalu terpola efektif. Inilah yang harus dipahami nakes,” tuturnya.

Ia juga menerangkan, kedepan akan ada proses pengkajian dan skrining yang akan dipersingkat berdasarkan standard WHO. “Itulah yang sedang diupayakan. Konsep yang lebih efektif, singkat dan padat,” pungkasnya. (rs1/adv/dinkes)



PWK untuk Pelajar. Najirah Mengajak Pelajar Tingkatkan Wawasan Kebangsaan

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang membuka dan menghadiri kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) bagi pelajar tingkat SMA/SMK se-Kota Bontang. Kegiatan PWK digelar di Ballroom Grand Equator Hotel pada Senin (25/9/2023).

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, mengatakan bahwa pendidikan wawasan kebangsaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang cakap, bertanggung jawab, dan mencintai tanah airnya. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang wawasan kebangsaan, para pelajar dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Bontang, Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan.

Selanjutnya, Najirah mengatakan bahwa tema 'Memperkuat Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar Kalimantan Timur Guna Menyukseskan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024' sangat relevan dengan situasi saat ini.

"Pemilihan umum adalah salah satu tonggak demokrasi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita, sebagai warga negara yang baik, harus memahami betul proses ini dan memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas dan kedamaian negara kita," jelas Najirah pada Senin (25/9/2023).

Selain menumbuhkan rasa kebangsaan, Najirah menambahkan bahwa PWK akan membekali pelajar dengan pengetahuan yang lebih baik tentang bangsa dan negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses demokrasi yang sehat dan



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, saat membuka kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) di Grand Equator Hotel.



berkeadilan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan program ini," kata Najirah.

Najirah juga mengajak para pelajar untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan berinteraksi dalam mendapatkan ilmu yang dapat menjadi pegangan

sebagai warga negara. "Saya berharap agar program PWK ini tidak hanya menjadi sekadar kegiatan rutin, tetapi juga menjadi semangat yang membara dalam diri setiap pelajar. Jadilah agen perubahan yang terus berjuang untuk kebaikan bangsa dan negara," pungkas Najirah. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Wali Kota Basri Rase saat memimpin peringatan gerakan pramuka ke-62.

Basri Pimpin Upacara Peringatan Gerakan Pramuka, Tekankan Peningkatan SDM

BONTANG – Wali Kota Bontang Basri Rase memimpin upacara peringatan Hari Gerakan Pramuka ke-62 di Kota Bontang pada Senin (25/9/2023) bertempat di lapangan parkir DPMPTSP.

Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan melalui tema “Dengan peringatan hari pramuka ke-62, Mari kita wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan” menunjukkan semangat gerakan Pramuka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih profesional.

Basri menambahkan bahwa wawasan kebangsaan juga menjadi sangat penting agar nilai-nilai kebangsaan kita tidak luntur, menanamkan nasionalisme, cinta tanah air dan semangat bela negara.

“Terlebih sekarang akan menghadapi tahun politik kiranya persatuan dan kesatuan gerakan pramuka harus tetap solid dan menjadi garda terdepan untuk merajut persatuan dan kesatuan,” kata Basri Rase.

Basri melanjutkan perlunya peningkatan jumlah dan kualitas pembina serta pelatih Pembina Pramuka yang dapat terus ditingkatkan.

“Kwartir nasional juga telah menaruh perhatian pada peningkatan kualitas gugus-gugus depan pramuka di mana pun berada. Untuk itu saya berharap bahwa kwartir di semua tingkatan harus dapat turut membantu peningkatan kualitas gugus depan yang berada di wilayah masing-masing,” jelas Basri.

Hal lainnya, Basri meminta untuk

mendukung kegiatan-kegiatan pramuka yang bersifat nasional seperti Raimuna Nasional, Perkemahan Bakti Satuan Karya (Pertisaka) Bakti Husada Tingkat Nasional, Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putri-Putra Nasional (Musppanitra) serta Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka di Banda Aceh, Provinsi Aceh

“Pada tahun ini juga akan dilaksanakan sejumlah kegiatan nasional. Marilah kita bersama-sama untuk mendukung serta menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut,” ungkap Basri. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari





Menjaga Eksistensi Bertutur Bahasa Asli Kaltim, di Saat Terpilihnya Kaltim Sebagai Wilayah IKN

SAMARINDA - Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi, Birokrasi, dan Keuangan Daerah, Drs. Didi Rusdiansyah, MM, menghimbau masyarakat asli daerah Kaltim untuk melestarikan bahasa asli Kaltim sebagai salah satu produk budaya asli Kaltim agar tidak punah.

Hal ini disampaikan oleh Didi saat menutup rangkaian acara penganugerahan lomba Pustakawanan dan Pengembangan Literasi masyarakat yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim beberapa waktu lalu di ruang serbaguna Pemerintah Provinsi Kaltim.

Didi memberikan contoh tentang budaya Betawi di Jakarta yang tergerus oleh kemajuan kota Jakarta, di mana banyak generasi muda yang meninggalkan budaya asli, termasuk cara bertutur bahasa Betawi.

"Kita sudah dipilih menjadi wilayah IKN, oleh karena itu kita harus mampu menjaga budaya kita, salah satunya adalah bahasa asli daerah Kaltim. Jangan sampai nanti anak cucu kita bertanya, bahasa asli Kaltim apa, kita tidak bisa menjawabnya," ujarnya.

Menurut Didi, bahasa asli Kaltim meliputi Bahasa Kutai, Bahasa Paser, dan Bahasa Dayak. Namun, saat ini ketiga bahasa ini sudah banyak ditinggalkan oleh penuturnya, terutama karena homogenitas masyarakat Kaltim saat ini.

"Kita sebenarnya tidak kekurangan penuturnya, tetapi sekarang semakin sedikit yang menggunakannya, terutama dengan kedatangan suku-suku pendatang dari Jawa, Sulawesi, dan



Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi, Birokrasi, dan Keuangan Daerah, Drs. Didi Rusdiansyah, MM, saat memberikan Sambutan pada penutupan penganugerahan lomba Pustakawanan dan Lomba Pengembangan Literasi Masyarakat, DPKD Kaltim.

Kalimantan Selatan, yang membuat masyarakat Kaltim semakin homogen," ungkapnya.

Selain pengaruh dari pendatang, Didi juga mengatakan bahwa kemajuan teknologi, seperti media sosial yang populer di kalangan generasi muda, juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan bahasa asli Kaltim. Meskipun hal ini tidak dapat dihindari, tetapi Didi berpendapat bahwa berbicara dalam bahasa asli daerah bukan berarti bersikap primordial atau etnosentris, melainkan lebih kepada upaya untuk melestarikan produk-produk budaya asli Kaltim yang telah ada sejak lama.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kaltim adalah mengadakan lomba bertutur, yang saat ini dikelola oleh DPKD Kaltim. Melalui lomba ini, cerita-ceri-

ta rakyat asli daerah Kaltim diangkat sebagai upaya untuk menjaga budaya Kaltim agar tetap hidup.

"Kedepannya, bukan hanya ceritanya saja yang harus kita pertahankan, tetapi jika memungkinkan, tutur kata juga perlu dilakukan dalam bahasa asli Kaltim," pinta Didi.

Didi berharap masyarakat pribumi tetap mampu mempertahankan dan melestarikan bahasa asli Kaltim, dengan penetapan IKN di tengah wilayah Kaltim, sebagai karakter budaya asli Kaltim.

"Memelihara bahasa Kutai, Paser, dan Dayak adalah salah satu cara kami untuk menunjukkan eksistensi masyarakat pribumi Kaltim," tutupnya. (Han/ADV)

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus Susanto



Pustakawan Seksi Deposit dan Alih Media Patimah Irni SPd MSi

DPKD Ajak Masyarakat untuk Mengumpulkan Koleksi Naskah Kuno untuk Diarsipkan

SAMARINDA-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengajak masyarakat Kaltim untuk proaktif melestarikan naskah kuno. Karenanya, DPKD Kaltim pun membuka ruang bagi masyarakat memiliki koleksi naskah kuno untuk dapat disimpan atau diarsipkan di DPKD Kaltim.

Pustakawan Seksi Deposit dan Alih Media Patimah Irni SPd MSi mengatakan selama ini pihak DPKD sangat kesulitan untuk mencari naskah-naskah kuno yang banyak tersebar di wilayah Kaltim. Oleh sebab itu DPKD sangat berharap untuk masyarakat bisa menginformasikan agar cepat diarsipkan dan dilestarikan.

"Kita sangat butuh bantuan masyarakat, bahkan jika tidak bersedia untuk diambil, kami bisa datang bisa dialih mediakan agar bisa dilestarikan," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa naskah kuno mudah rusak, maka pihaknya sangat berharap untuk diinfokan secepatnya oleh masyarakat yang memiliki koleksi naskah kuno agar bisa dibantu untuk dilestarikan dengan cara diarsipkan dan dialih mediakan.

"Naskah kuno itu kan perlu perhatian ekstra, oleh sebab itu sangat berharap kerjasama masyarakat untuk bisa selamatkan naskah kunonya dengan dititipkan dan kita akan alih mediakan agar tidak hilang, untuk masyarakat yang memiliki tetap kita akan bagi hasil dari alih mediana," ujarnya.

Baru-baru ini pihak DPKD juga sudah memperoleh naskah kuno dari Kesultanan Gunung Tabur dan Kutai Kartanegara.

"Dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ada 11 naskah kuno dan Kesultanan Gunung Tabur Berau ada 13 Naskah, dan ini masih menung-

gu untuk di alih bahasakan," ujarnya.

Bahkan beberapa hari lalu. Pihak DPKD telah dihubungi oleh pihak Masjid Raya Darussalam Samarinda, konon masjid tersebut berdiri tahun 1925, dan memiliki beberapa naskah langka agar bisa dibantu untuk dilestarikan.

"Nah pihak masjid sudah menghubungi kita, kita akan bantu untuk lestarikan dan menjaga naskah kunonya, agar nanti bisa dipelajari oleh generasi kita nanti," ujarnya.

Saat ini naskah kuno dan naskah langka yang dimiliki oleh DPKD sebanyak 24.301 naskah, terdiri dari 20.014 karya cekat dan 4.287 karya non cekat berdasarkan sumber dari data koleksi deposit dan alih media per Juni 2023. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Asep Ahmad Sapturi

DPRD Balikpapan Apresiasi Pemkot Naikkan Insentif Guru TPA

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan memberikan dukungan kepada langkah Pemkot Balikpapan yang akan meningkatkan insentif bagi guru Tempat Pengajian Al Qur'an (TPA) pada tahun 2024 mendatang.

Saat ini, insentif bagi guru TPA sebesar Rp 440 ribu per bulan, dan Pemkot merencanakan untuk meningkatkannya menjadi Rp 500 ribu per bulan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Asep Ahmad Sapturi, menyatakan bahwa kenaikan insentif telah disepakati untuk tahun 2024, meskipun kenaikannya tidak begitu signifikan.

"Kenaikan insentif guru ngaji pada tahun 2024 mencapai Rp 500 ribu per

bulan. Biasanya, pada saat ini, pembayaran dilakukan dua kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan September," ujarnya pada Senin (25/9/2023).

Berdasarkan data, jumlah guru TPA di Kota Balikpapan mencapai sekitar 2.500 orang. Kenaikan insentif ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap para guru TPA.

"Ini adalah angka yang luar biasa dan menunjukkan perhatian Kota Balikpapan terhadap para guru ngaji. Ini juga merupakan bentuk perhatian dari pemerintah," jelasnya.

Meskipun sebelumnya terdapat penundaan atau keterlambatan pencairan insentif guru TPA selama dua pekan, Asep Ahmad menganggap bahwa keterlambatan tersebut bu-

kanlah hal yang sangat penting.

"Beberapa pekan yang lalu, pembayaran sempat tertunda, dengan sekitar 320-an guru TPA di seluruh Kota Balikpapan yang mengalami penundaan sedikit dalam pencairannya. Ini terkait dengan masalah administratif," tambahnya.

Asep Ahmad berharap bahwa dengan kenaikan insentif ini, semangat para guru TPA dalam mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid mereka akan semakin meningkat.

"Penting bagi pemerintah untuk menjaga motivasi mereka, karena mereka adalah garda terdepan dalam memerangi buta huruf membaca Al-Quran," tutupnya. (ADV/ DPRD Balikpapan/Bom)



Anggota Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman

Pelayanan Puskesmas Dikeluhkan, Taufik Minta DKK Segera Tindaklanjuti

BALIKPAPAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan tengah menggodok Raperda Kesehatan.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan bahwa sebelum menjadi Peraturan Daerah (Perda), pihaknya harus terlebih dahulu mengevaluasi bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini penting agar dapat diakomodasi dalam Perda dan diterapkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Namun, kami menghadapi kendala, oleh karena itu saya meminta Kepala DKK agar meningkatkan pelayanan di seluruh Puskesmas hingga jam kerja selesai," ujarnya pada Senin (25/9/2023).

Taufik juga menyampaikan bahwa selama ini banyak aduan dari masyarakat mengenai pelayanan

Puskesmas yang hanya berlangsung hingga pukul 11.00 Wita, sedangkan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berakhir pada pukul 15.35 Wita.

"Mereka telah berjanji untuk melayani masyarakat, karena kami digaji melalui upaya warga yang membayar pajak," jelasnya.

Taufik mengingatkan bahwa Dinas Kesehatan adalah mitra Komisi IV, tetapi sebagai Bapemperda, prioritasnya adalah memastikan bahwa pelayanan telah diperbaiki sebelum Perda dibentuk. Terdapat 6 pilar yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah pelayanan masyarakat.

"Yang paling penting adalah meningkatkan pengawasan terhadap Puskesmas di setiap Kelurahan sehingga pelayanan dapat berlangsung hingga jam kerja selesai, yaitu pukul 15.35 Wita," tambahnya.

Lebih lanjut, Taufik menunjukkan kekhawatirannya tentang situasi di mana masyarakat yang kurang mam-

pu secara ekonomi diarahkan ke rumah sakit besar. Ia mengakui bahwa penggunaan BPJS saat ini sangat rumit, yang mengundang pertanyaan bagaimana masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

"Saya sedang mencari cara untuk memperjuangkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai," tegasnya.

Taufik juga menekankan bahwa jika terdapat Puskesmas di daerah lain yang hanya membuka layanan hingga pukul 11.00 Wita, DKK harus segera mengambil tindakan sebelum hal ini diatur dalam Perda.

"Meskipun ranahnya sebenarnya berada di Komisi IV, kami memiliki tanggung jawab untuk membentuk Perda sehingga nantinya Perda tersebut dapat menjadi acuan jika terjadi pelanggaran oleh Puskesmas," tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan/Bom)



HUNAS RSUD

Salah satu ruang klinik di Gedung B.

Sejumlah Klinik di RSUD Taman Husada Akan Pindah ke Gedung B

BONTANG - Mulai besok, beberapa klinik rawat jalan dipindahkan ke gedung baru atau gedung B, RSUD Taman Husada Kota Bontang. Hal itu dijelaskan dr. Siti Aisyatur Ridha dari tim humas RSUD Taman Husada Bontang, Senin (25/9/23).

Hal ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan rawat jalan dan perpindahan beberapa klinik ini terkait pembangunan layanan MRI di lantai dasar gedung A RSUD, selain itu perpindahan ini dalam rangka merespon usulan dari pelanggan RS terkait ruang tunggu poliklinik rawat jalan yg menginginkan ruang tunggu yang nyaman dan kondusif.

"Ada beberapa layanan klinik rawat

jalan yang masih ada di gedung lama, di antaranya klinik anak, klinik kandungan-kebidanan, klinik bedah, klinik Saraf, klinik jantung, dan klinik penyakit dalam" ujarnya

Untuk mekanisme pendaftaran tetap seperti biasa, masyarakat melakukan pendaftaran di lobi gedung A. Kemudian, untuk pasien-pasien yang akan menuju klinik yang mengalami perpindahan, setelah mendaftar dapat langsung menuju gedung B melalui lift yang tersedia di basement gedung B menuju lantai 3.

"Petunjuk arah dan penanda lift sudah disiapkan oleh rumah sakit sehingga pasien dapat memahami arah tujuan menuju ruangan baru

poliklinik lantai 3 gedung B," tambahnya.

Untuk jadwal operasional Klinik Gigi Anak, konservasi gigi dan THT dimulai hari Selasa (26/9/23), kemudian Klinik Bedah Onkologi, Bedah Mulut, MCU, Kulit dan Kelamin dimulai hari Rabu (27/9/23) dan Klinik Mata pada hari Jumat (29/9/23).

Nantinya, perpindahan akan dilakukan secara bertahap. Kemudian, ruangan-ruangan sebelumnya akan digunakan untuk pengadaan alat MRI.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Foto bersama dan kegiatan pembukaan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan.

Tingkatkan Kualitas Pramuka, Dispopar Gelar Kursus Pembina Mahir Tingkat Lanjut

BONTANG – Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang menggelar Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) Golongan Penggalang Gerakan Pramuka Cabang Kota Bontang, Sabtu (23/9/2023).

Pembukaan kegiatan KML yang dinaungi gerakan pramuka cabang Kota Bontang ini dihelat di Lantai 3 Gedung Dispopar. Dibuka secara langsung oleh Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkot Bontang, Syahrudin.

Dikatakan Syahrudin, kursus pem-

bina pramuka mahir tingkat lanjutan ini adalah jenjang pendidikan tertinggi bagi pembina pramuka. Tujuannya untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman praktis pembina pramuka melalui kepramukaan dalam satuan perindukan siaga dan pasukan penggalang.

“Setelah selesai mengikuti KML ini, para peserta akan bertugas meningkatkan kemampuan dan jumlah pembina pramuka mahir tingkat dasar, dalam membina anggota pramuka di gugus depan masing-masing,” ujarnya.

Adapun jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 40 orang. Kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu, terhitung 23-29 September 2023. Pemateri yang dihadirkan dari pusat pendidikan pelatihan cabang gerakan pramuka Kota Bontang.

Turut hadir dalam acara pembukaan di antaranya Jabatan Fungsional (Jabfung) Bidang Pemuda Dispopar Bontang, Nur Muslim, Ketua Kwartir Cabang, Budi Supriyanti dan Ketua Pusdiklatcab, Muhammad. (al/adv)





ibis
SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

 @ibishotelsamarinda  0811 - 551 - 6000

all.accor.com



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

DPRD Berau Dorong Optimalisasi Potensi Kampung Biduk-Biduk

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Abdul Waris mendorong masyarakat Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk untuk memaksimalkan potensi kampung, sebagai magnet kunjungan wisatawan.

Itu dikatakannya usai menghadiri pembukaan Hari Jadi ke-111 tahun Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk, di Lapangan Majahada Kampung Biduk-Biduk, Minggu (24/9/2023) lalu.

Dirinya mengucapkan selamat Hari Jadi ke-111 tahun Kampung Biduk-Biduk. Diharapkannya, pembangunan di Kampung Biduk-Biduk terus berlanjut hingga terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan bagi

masyarakat.

“Peringatan hari jadi kampung ini bisa dijadikan motivasi generasi muda mengingat sejarah berdirinya atau asal usul kampung,” ucapnya.

Selain itu perayaan peringatan hari jadi kampung menjadi kesempatan untuk silaturahmi antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah kampung serta stakeholder terkait lainnya. Guna bertukar gagasan untuk kemajuan pembangunan daerah sehingga pembangunan berdampak positif dan tepat guna sasaran.

“Momentum ini dimaknai untuk membangun kampung lebih maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh dirasakan oleh warga masyarakatnya,” terangnya.

Diungkapkannya, dengan mengoptimalkan berbagai potensi kampung yang ada, diharapkan dapat menggerakkan sekaligus menghidupkan geliat pariwisata di Biduk-Biduk.

“Dengan berbagai potensi yang ada harus bisa diketahui oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” terangnya.

Dirinya juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di Kampung Biduk-Biduk. Dengan begitu diharapkan ke depan juga akan menambah sisi pendapatan daerah.

Pewarta: Amnil Izza
Editor : Nicha Ratnasari

Atila Garnadi: Pemkab Harus Optimal Gali PAD dari Berbagai Sektor



Sekretaris Komisi II DPRD Berau,
Atila Garnadi

TANJUNG REDEB - Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Atila Garnadi minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau untuk optimalkan sektor pendapatan daerah, terutama potensi yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, masih banyak sektor di Bumi Batiwakkal yang harus dievaluasi agar memenuhi target setiap tahunnya. Apalagi, pemasukan dari PAD yang ada sekarang masih belum optimal. Dibutuhkan inovasi dan kemampuan mengelola PAD untuk dapat memaksimalkannya.

"Untuk memaksimalkan PAD ini tentu OPD terkait harus memiliki kreatifitas dan kemampuan untuk mengelolanya," jelasnya, Senin (25/9/2023).

Di sisi lain, Atila menyebut, perda yang ada khususnya berkaitan dengan PAD juga harus dievaluasi kembali untuk percepatan target yang ingin dicapai.

Diharapkannya, Pemkab Berau lebih banyak memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau ke sektor ekonomi. Terlebih yang memiliki pendapatan atau feedback ke PAD.

Ini penting, dengan mendukung sektor yang produktif akan mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Berau. "Harapan kami seperti itu. Bisa ada evaluasi ke depan agar PAD Berau semakin lebih baik," pungkasnya. **(mnz/dez)**

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*



THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel



Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Urusan Toyota lebih mudah!





AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

Dorong Lanjutan Pembangunan Jembatan Muara Lesan, DPRD Berau Tegaskan Jangan Sampai Mangkrak

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Saga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Muara Lesan Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay. Pasalnya telah terhenti beberapa tahun.

Disampaikan bahwa pihaknya bersama rekan legislatif lainnya justru telah melakukan pembahasan ini. Dan terus mendorong pemerintah daerah segera melanjutkannya. Apalagi, pendanaan dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Berau tersedia.

"Jangan sampai dianggap mangkrak dan terbengkalai padahal sudah ada dana dari Bankeu Kaltim dan APBD Berau juga besar," ungkapnya, Senin (25/9/2023).

Apalagi akses yang vital itu menjadi harapan bagi masyarakat di sana. Tak hanya mendekatkan mobilisasi antar kampung, tapi juga memudahkan pelajar yang sekolahnya berada di seberang kampungnya.

"Pada prinsipnya kita minta pembangunannya di lanjutkan. Mengingat pembangunan sudah lama tidak dilanjutkan," tegasnya.

Lanjutnya, kajian yang sebelumnya dilakukan tentu mempertimbangkan hal-hal tersebut hingga sebelumnya sudah terbangun satu abutmen dari Jembatan Muara Lesan. Ketika tak kunjung dilanjutkan, Saga menilai ini bisa menjadi penghambat aktifitas masyarakat disana.

"Kita tentu ingin ini berlanjut, dan kami berkomitmen akan mendukungnya pada anggaran yang datang," pungkasnya.

Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Benny Sepriady Panjaitan menjelaskan, lanjutan pembangunan Jembatan Muara Lesan akan diusulkan pada APBD Berau murni 2024. Namun, kemungkinan hanya mengerjakan abutmen pada satu sisi lainnya.

"Dimulai dengan membangun Abutmen disisi satunya, karena yang

satu sudah ada. Semoga saja lancar di tahun depan," harapnya.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Muara Lesan ini memang sebaiknya dikerjakan secara Multi Years Contract (MYC). Sebab, beberapa pekerjaan yang dilakukan cukup sulit. Misalnya untuk pemasangan abutmen memerlukan kapal ponton untuk dudukan mesin pancang.

"Sedangkan lokasinya tidak memungkinkan ponton masuk," ungkapnya.

Sehingga, kemungkinan terbesar adalah merakit kapal ponton untuk dudukan mesin pancang diatas aliran sungai yang cukup deras. Sebab, ukuran ponton non rakit yang besar serta akses masuk yang tidak ada itu menyebabkan metode pekerjaan cukup sulit.

"Untuk memutuskan menggunakan metode apa yang digunakan ini sebabnya jadi agak lama. Rencananya tahun depan kalau disetujui akan dianggarkan lagi sisi seberangnya. Perencanaannya kita pakai yang lama, paling menyesuaikan ekskalasi harga saja," ungkapnya.

Dipaparkannya, kebutuhan abutmen memerlukan dana sekitar Rp 10 Miliar. Sedangkan kebutuhan pendanaan hingga jembatan rampung mencapai Rp 55 Miliar.

Jembatan dengan bentangan

mencapai lebih dari 100 meter itu merupakan usulan-usulan dan masukan dari masyarakat secara masif. Benny mengatakan, memang akses tersebut sangat penting bagi masyarakat. Selain jadi jalur terdekat antara rumah dengan kebun warga, anak-anak sekolah juga kerap menyeberang menggunakan ketinting. Tipikal arus sungai yang deras itu tidak dianjurkan untuk menyeberang, apalagi anak-anak.

Kemudian, Camat Kelay, Toris menuturkan, Jembatan Muara Lesan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Sebagai akses penghubung masyarakat dengan berbagai sektor. Akses tersebut sangat memudahkan lantaran menjadi akses terdekat menuju pusat kecamatan dan ibu kota kabupaten.

Beberapa kampung seperti Panaan, Mapulu, Merabu dan Merapun disebutnya lebih cepat lewati akses Muara Lesan dibanding harus memutar. Seperti, masyarakat yang ingin menuju Kampung Panaan jika memutar melewati Kampung Merapun butuh waktu sekitar satu jam. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Dezwan



ISTIMEWA

Kapal penyeberangan di Kampung Muara Lesan menjadi alternatif bagi masyarakat lantaran tidak memiliki jembatan.



Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, IPTU Hendrik Saragih, saat melakukan olah TKP terjatuhnya NM dan tiga orang bayi.

Kasus Tewasnya Bayi TR di Balikpapan: Pengasuh Bayi Jadi Tersangka

BALIKPAPAN - Polsek Balikpapan Selatan resmi menetapkan pengasuh bayi berinisial NM (24) sebagai tersangka atas kematian bayi berinisial TR (1,5) pada Minggu (10/9/2023) lalu yang terjatuh dari gendongannya.

Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, IPTU Hendrik Saragih, mengatakan penetapan NM sebagai tersangka sesuai hasil penyelidikan kepolisian. NM dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengasuh bayi.

“Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pengasuh bayi berinisial NM ini terbukti lalai saat menjalankan tugasnya,” ujarnya pada Senin

(25/9/2023).

Lebih lanjut, Saragih menjelaskan bahwa NM pada saat itu mencoba menggendong tiga bayi sekaligus untuk pergi ke sebuah acara pernikahan. Namun, saat dalam perjalanan, NM terpeleset, dan bayi TR yang dipegang tangan kanannya pun terlepas. “Dua bayi lainnya selamat karena masih dipegangannya, sedangkan bayi TR terjatuh,” jelasnya.

Saat ini, kepolisian memastikan bahwa berkas perkara NM masih dalam proses penanganan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan tambahan terhadap kasus ini. Mereka berencana segera melimpahkan berkas perkara ini ke Kejaksaan agar

pelaku yang masih muda tersebut bisa segera diadili.

Kondisi pelaku sendiri saat ini telah membaik. Sebelumnya, NM terlihat mengalami syok dan stres akibat insiden tersebut. “Kasus ini masih terus kami tangani, dan berkas perkara akan segera kami lengkapi,” tambahnya.

Dalam kasus ini, NM dijerat dengan Pasal 359 KUH Pidana tentang Kelalaian yang memiliki ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita

DPU Terus Berupaya Kurangi Titik Banjir di Kota Balikpapan

BALIKPAPAN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan terus berupaya mengurangi titik banjir di Kota Balikpapan. Hal ini merupakan program prioritas Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita mengatakan, sejak dimulainya pengerjaan proyek penanggulangan banjir, DPU menargetkan hingga tahun 2026 mendatang, titik banjir di Kota Balikpapan bisa terus dikurangi.

"Mudah-mudahan bisa terus kita kurangi hingga akhir 2026 mendatang titik banjir tersisa 16 saja. Di RPJMD 2021-2026 adalah 81 titik banjir. Pada akhir 2022 lalu ada 60 titik banjir di Balikpapan," ujarnya, Senin (25/9/2023).

Lebih lanjut Rita menjelaskan, sudah memilih titik banjir berdasarkan wilayah. Upaya yang dilakukan yakni pengadaan tanah untuk bendali di Kampung Timur, Wonorejo.

"Tahun ini sudah membayar seluruhnya. Karena kemarin sudah ada rapat tentang pembayaran pengadaan tanah, sudah selesai," jelasnya.

Untuk pengadaan lahan bendali Ampal Hulu sejak tahun lalu anggaran sudah disiapkan. Bendali ini

untuk menahan air yang berada di daerah saluran primer Ampal.

"Bendali ini luasnya 10 hektar, perencanaan di Balai. Proses pembebasan lahan ada Pemerintha Kota. Setelah clear akan dibantu Balai Wilayah Sungai (BWS)," tambahnya.

Kegiatan lainnya dilakukan yakni pengadaan pompa pengendalian banjir saluran primer Ampal, saluran tersier Ampar Lestari II, Drainase Jalan Perintis Batu Ampar, Drainase MT Haryono Depan Living Plaza, Drainase Ruhui Rahayu, Gorong-gorong Puspoyudo, Saluran sekunder Srat III, Saluran tersier Malioboro, Drainase RT 32 Karang Joang, Drainase RT 34 Sei Wein Kelurahan Joang, Normalisasi Saluran primer Pandansari, Saluran Masjid At Thoriq, Sal Primer Somber.

Untuk jangka pendek dilakukan normalisasi, pembersihan saluran, pembersihan rumah pompa. Sedangkan untuk jangka menengah mereboisasi lahan terbuka, menegakan garis sepadan sungai dan revitalisasi bendali perumahan dan kota.

"Jangka panjangnya itu normalisasi saluran, bangun-bangunan pengendali banjir, buat crossing dan buat saluran ke arah laut dan membuat

jetty," ujar Rita lagi.

DAS Ampal merupakan titik banjir yang salah satunya hingga saat ini masih dikerjakan dan paling prioritas dalam pengendalian banjir di Kota Balikpapan.

Penyebab banjir juga disebabkan penumpukan sampah pada saluran yang menyebabkan dimensi saluran berkurang. Selain itu juga sedimentasi yang tinggi pada saluran, sehingga dataran rendah terjadi pada daerah hilir.

Penyebab lainya pembukaan lahan, baik untuk pemukiman atau lainya. Untuk daerah tinggi, DPU Balikpapan akan kordinasikan dan konsolidasikan kepada DLH dalam pembukan lahan secara sporadis. Sebab mereka yang membuka lahan untuk bangunan umum atau pengembangan perumahan harus ada izin yang dilalui.

"Tetapi kalau lahan dimiliki perseorangan, buka lahan itu teman-teman kesulitan untuk monev. Dari level bawah, Kelurahan hingga Kecamatan tapi ini terus dilakukan upaya-upaya di lapangan," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

Hanya Ada 4 Tenaga Ahli Tersertifikasi, Penyebab Pengurusan PBG Lamban

BONTANG – Lambannya proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), nama terbaru dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) lantaran disebabkan minimnya tenaga ahli tersertifikasi yang ada di Bontang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Tata Ruang, Roby Malissa.

Dijelaskan Roby, saat aturan terbaru dari pengurusan PBG tersebut disahkan oleh presiden, di Bontang sangat minim sekali tenaga ahli tersertifikasi. Saat ini tercatat hanya ada 2 tenaga arsitek dan 2 tenaga sipil yang tersertifikasi.

Selain minim tenaga ahli tersertifikasi, kendala lainnya lantaran tenaga ahli tersertifikasi yang ada ini sudah memiliki pekerjaan utama, dimana

rata-rata sebagai konsultan bangunan. Sehingga mereka lebih memilih pekerjaan utamanya dibandingkan mengerjakan PBG, yang hasil didapatkan jauh lebih kecil.

“Karena itulah pengurusan PBG ini terkesan lamban. Bukan karena kesalahan di Dinas PUPR atau DPMPTSP, tapi karena kurangnya tenaga ahli tersertifikasi, dimana tenaga ahli tersertifikasi ini sebagai salahsatu kewajiban terbaru yang harus dipenuhi saat pengurusan PBG,” bebrnya menjelaskan.

Ditambahkan Roby, sebagai solusi pun Pemkot Bontang tidak bisa begitu saja mensertifikatkan para tenaga ahli yang ada, karena terbentur aturan. Ada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang memiliki kompetensi untuk mengadakan pelatihan maupun mengeluarkan sertifikasi.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, syarat untuk menjadi Arsitek adalah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). STRA merupakan bukti tertulis bagi Arsitek untuk dapat melakukan praktik arsitek.

Kewajiban seorang Arsitek memiliki STRA baru berlaku pada Februari 2021 sejak Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain mengatur tentang syarat dan tata cara penerbitan STRA, Undang-Undang dan Peraturan tersebut juga mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki STRA. (al/adv)





SPECIAL PROMO GANTI OLI MESIN

TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088





Audit Bayi Berisiko Stunting Kembali Dilaksanakan

BONTANG - Audit kasus stunting kota Bontang yang kedua dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Bontang Utara, Senin (25/9/23).

Sekretaris PKK Kecamatan Bontang Utara, Vike Setiawan menjelaskan bahwa ini kegiatan dari DPPKB. Bayi-bayi yang hadir diaudit tersebut merupakan rekomendasi dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ditunjuk oleh kecamatan, yang juga merupakan anggota PKK.

"Bayi atau keluarga yang berisiko stunting akan didampingi untuk beberapa bulan, namun karena tidak ada perkembangan maka mereka dipanggil di audit ini," jelasnya

Rata-rata anak yang direkomendasikan memiliki berat badan yang tidak mencukupi, umur mereka sudah dua tahun, tinggi sudah mencukupi namun berat masih kurang.

"Di audit yang kedua ini kami ada dokter spesialis anak, psikologi, dan ahli gizi, jadi betul-betul kita konsenkan mereka untuk konsultasi," tambahnya.

Okta, salah satu warga Guntung



SYAKURAH/RADARBONTANG

Kegiatan audit bayi berisiko stunting.

yang diundang untuk mengonsultasikan anaknya mengaku sudah mendapatkan perhatian yang khusus dari TPK, namun karena memang tidak ada kenaikan berat badan ia diundang untuk menghadiri audit tersebut.

"Anak saya selalu dapat makanan

tiap pagi buat dia sarapan, sudah lama, tapi sepertinya masih kurang, jadi datang ke sini untuk konsultasi juga," tutupnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Wigen Kencana No. 226A, Belimbing Dua, Bontang Barat
Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!



ISTIMEWA

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah (memakai baju putih tengah), saat ikut bermain Begasing.

Puluhan Jenis Olahraga Tradisional Ramaikan Erau Adat Pelas Benua 2023

TENGGARONG - Suara tiupan sumpit dan pertarungan sengit dalam permainan gasing menandai dimulainya lomba olahraga tradisional (oltrad) yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Pesta Erau Adat Pelas Benua 2023. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, tampak ikut bermain sambil didampingi oleh Dandim 0906/Kukar, Letkol (Inf) Jeffry Satria, dan peserta yang siap menunjukkan keahlian mereka. Kegiatan ini berlangsung di Parkiran Jembatan Repo-repo, Tenggarong.

Sebanyak 10 cabang olahraga tradisional akan dipertandingkan selama satu minggu dalam Pesta Erau Adat Pelas Benua, berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 September 2023 ini. Beberapa cabang oltrad yang akan dipertandingkan antara lain Behempas Bantal, Belogo, Dagongan, Hadang, Begasing, Katapel, Enggrang, Kelom Panjang, Menyumpit, dan Panahan Tradisional.

Pertandingan olahraga tradisional ini akan difokuskan di tiga lokasi berbeda, yaitu Parkiran Jembatan Repo-repo, Halaman Planetarium

Jagat Raya Tenggarong, dan Lapangan Panahan di Stadion Rondong Demang Tenggarong.

"Bermula dari hari ini, olahraga tradisional telah dimulai dalam rangka meriahkan Pesta Erau Adat Pelas Benua 2023," kata Bupati Kukar, Edi Damansyah, sambil membuka pertandingan oltrad pada Senin (25/9/2023).

Olahraga tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dan kearifan lokal yang harus terus dilestarikan. Hal ini juga penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda di tengah era digitalisasi saat ini, di mana segalanya dapat diakses melalui perangkat pintar. Bupati berharap agar perpindahan potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menggerus kearifan lokal yang ada.

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga tradisi yang kental di Kukar khususnya. Semoga kegiatan ini tidak hanya memeriahkan Erau, tetapi juga memberikan hiburan kepada masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kukar, Lukman, mengungkapkan

bahwa acara ini bertujuan untuk menghimpun para pecinta oltrad di Kukar, sekaligus memperkenalkan dan mencari bibit-bibit baru. Pasalnya, Kukar memiliki banyak jenis olahraga tradisional yang memiliki penggemarnya sendiri.

"Pelatihan dan peningkatan bakat-bakat olahraga tradisional dilakukan melalui event-event seperti ini," ungkap Ketua KORMI Kukar, Lukman.

Selain memiliki basis penggemar yang kuat, olahraga tradisional juga akan dijadwalkan secara rutin. Tujuannya bukan hanya untuk melestarikan kebudayaan oltrad itu sendiri, tetapi juga memberikan peluang bagi para pecinta oltrad untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Kini, oltrad sudah menjadi ajang kompetisi tingkat nasional.

"Karena pengembangan olahraga tradisional telah berakar kuat, namun seringkali para atlet merasa jenuh jika hanya berlatih tanpa ada event kompetisi," tutup Lukman.

Penulis: Muhammad Rafi'i
Editor: Agus Susanto



Dukungan Kutim untuk Erau, Momentum Naik Kelas Kaltim di Indonesia

TENGGARONG - Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum (Admum) Seskab Kutim, Didi Herdiansyah, menyatakan bahwa Erau Adat Pelas Benua 2023, yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dari Minggu (24/9/2023) hingga 2 Oktober 2023 mendatang, menjadi momentum penting bagi seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menunjukkan kesiapan mereka dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tangan terbuka.

Meskipun Erau Adat Pelas Benua 2023 berpusat di Kukar, tema keseluruhan acara adalah "Semangat IKN, Menjaga Adat dan Tradisi Budaya." Tema ini memotivasi tiap kabupaten/kota di Kaltim untuk menunjukkan kapabilitas mereka sebagai daerah yang siap mendukung masa depan bangsa dan Republik Indonesia (RI).

Didi menekankan bahwa pada bulan sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor dan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman hadir dalam peresmian pabrik semen milik PT Kobexindo Cement di Desa Selangkau,

Kutim. Pabrik semen ini, yang dimiliki oleh investor asal China, Hongshi Holding Group, dan PT Kobexindo, memiliki tujuan untuk mencapai produksi tahunan sebanyak 8 juta ton dengan nilai investasi 1 miliar USD.

Menurut Didi, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman berharap bahwa berdirinya pabrik semen ini dan mulai beroperasinya produksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kutim. Hal ini termasuk penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, dan pengembangan industri terkait serta manfaat sosial lainnya.

Didi menekankan pentingnya efek pengganda yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat.

"Termasuk dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), saya berharap agar program ini juga menyorot bidang-bidang seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dengan sasaran yang tepat. Harapan kami adalah agar PT Kobex-

indo Cement juga ikut berkontribusi dalam mendukung percepatan perekonomian nasional dan khususnya Kabupaten Kutim sesuai dengan visi dan misi Menata Kutim Sejahtera untuk Semua," jelasnya setelah menghadiri pembukaan Erau di Ruang Stinggil Keraton Kesultanan/Museum Mulawarman pada Minggu (24/9/2023).

Didi kembali menegaskan bahwa setiap Kabupaten/Kota di Kaltim harus menonjolkan keunggulannya agar bisa menjadi daya tarik dan berperan dalam proses berbangsa dan bernegara di masa depan.

"Karena IKN bukan hanya sekadar wacana, tetapi sudah menjadi kenyataan dengan perkembangannya yang sangat cepat. Kami tidak boleh berpuas diri, tetapi harus mengisi setiap bidang dengan kemampuan internasional yang memiliki ciri khas lokal. Kabupaten Kutim telah menunjukkan komitmen dalam mendukung IKN melalui perkembangan industri, dan saatnya kabupaten/kota lain turut serta dalam mengisi aspek-aspek pembangunan lainnya," tegasnya. (Rkt)



Polisi Gagalkan 26 Paket 168,6 Gram Sabu di Paser

PASER - Kepolisian Sektor (Polsek) Long Ikis berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 168,6 gram yang dikemas dalam 26 paket berbagai ukuran oleh dua pemuda di sebuah kontrakan, Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, pada Minggu (23/9/2023).

Dalam upaya pengagalan ini, petugas berhasil mengamankan pria berinisial MAS (24), yang merupakan warga Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dan KAM (22) yang merupakan warga Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis dan juga penghuni kontrakan tersebut.

Kapolsek Long Ikis, AKP Alimuddin, menyatakan bahwa kejadian ini bermula dari penangkapan terhadap KAM (22), yang ditemukan menyimpan sabu di kontrakannya. Dari pengakuan pria tersebut, diketahui bahwa barang tersebut adalah milik MAS (24), yang merupakan rekannya.

"Setelah mendapatkan pengakuan tersebut, kami segera melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya. Proses ini kami lakukan sehari se-

belumnya, pada Sabtu dini hari. Kami berhasil menemukan pelaku lainnya dan membawanya ke tempat kejadian perkara," kata AKP Alimuddin, pada Senin (25/9/2023).

Setelah tiba di kontrakan, petugas segera melakukan penelusuran dalam ruangan tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga akan diedarkan di wilayah tersebut. Selain menemukan 26 paket berisi 168,6 gram sabu, petugas juga berhasil mengumpulkan barang bukti lainnya.

Barang bukti lainnya termasuk sendok takar berbahan plastik dan satu bundel plastik yang diduga digunakan untuk mengemas sabu. Selain paket yang dibungkus dengan plastik, petugas juga menemukan sabu yang dibungkus dengan tisu.

"Satu paket sabu ada dalam kotak, dua puluh paket dalam plastik yang diduga siap untuk diedarkan, serta lima paket yang dibungkus dengan selembar tisu. Semua barang tersebut kami temukan di dalam kontrakan pelaku," jelas Alimuddin.

Kapolsek Long Ikis menjelaskan

bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak sempat beredar di masyarakat. Selain sejumlah barang bukti tersebut, petugas juga berhasil menyita uang tunai senilai Rp 81 ribu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diamankan di Polsek Long Ikis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami berhasil mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti, dan saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya.

Hingga saat ini, petugas masih dalam proses penyelidikan untuk mengidentifikasi sumber asal barang bukti tersebut. Namun, berdasarkan keterangan yang telah diperoleh, diketahui bahwa kedua pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka baru saja memulai operasionalnya selama dua minggu.

Sementara itu, jika sabu tersebut berhasil dijual, maka nilai penjualan diperkirakan mencapai Rp 250 juta. Kedua pemuda tersebut terancam dijerat dengan pasal 112 juncto 114 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (bs)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor, Senin (25/9/2023).

Pemkab PPU Siap Gelar Pilkades Serentak 2023, Libatkan Akademisi UI Seleksi Cakades

PPU - Ada 14 desa di Penajam Paser Utara (PPU) yang tahun ini yang bakal berganti kepemimpinan. Sebagai penyelenggara, Pemkab PPU bakal melibatkan akedemisi dari Universitas Indonesia (UI) sebagai tim penyeleksi calon kepala desa (cakades).

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2023 ini digelar pada 29 Oktober mendatang. Pemkab PPU telah menggelar rapat koordinasi lintas sektro dalam mempersiapkan penyelenggaraan kontestasi di tingkat terbawah ini.

"Pada prinsipnya seluruh forkopimda, baik DPRD, TNI, kepolisian, kejaksaan dan lainnya telah bersinergi satu sama lain menyambut pelaksanaan pesta demokrasi Pilkades di 14 desa yang ada di Kabupaten PPU," ujar Pj Bupati PPU, Makmur Marbun Senin (25/9/2023).

Dalam rapat yang dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU itu, dihadiri pula Komisi I DPRD PPU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) dan seluruh camat PPU.

Dari data yang ada, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 14 Desa yang tersebar di seluruh kecamatan PPU se-

banyak 30.155 jiwa. Terdiri dari pemilih Laki-Laki 15.448 dan pemilih perempuan 14.634 jiwa serta akan disediakan sebanyak 60 TPS.

Adapun dasar penyelenggaraan Pilkades ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) 15/2017. Di dalamnya juga menyebutkan jika jumlah calon kepala desa lebih dari 5 orang maka akan dilakukan seleksi melalui ujian tertulis.

Dalam hal ini, Makmur menyebutkan akan melibatkan perguruan tinggi dari luar daerah. Bahkan dirinya menyebutkan sudah menjalin komunikasi dengan akademisi Universitas Indonesia (UI).

"Saya sudah hubungi sejumlah akademisi yang kompeten dari Universitas Indonesia Jakarta, untuk berkenan menjadi tim seleksi calon kepala desa (cakades) di Kabupaten PPU. Ini untuk memastikan bahwa ujian tertulis yang akan dilaksanakan berlangsung secara fair dan netral, sesuai dengan apa yg kita harapkan" ungkapnya.

Sementara itu, pelaksanaan ujian tertulis ini akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2023 di Kantor Bupati PPU. Makmur berharap, sore harinya setelah

tim seleksi bekerja, mereka langsung mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.

"Saya minta agar yang hadir hanya 24 calon kepala desa terkait. Karena seleksi hari itu juga harus selesai, saya minta untuk Kapolres, Dandim dan satpol PP membantu pengamanan dalam acara tersebut," tegasnya.

Selebihnya, ia meminta seluruh masyarakat PPU khususnya desa yang melaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pesat demokrasi ini. Utamanya untuk mengantisipasi bersama potensi gejolak yang muncul terkait keamanan.

"Saya berharap bahwa pada pelaksanaan pilkades di PPU nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya minta bapak ibu fokus pada agenda ini. Semoga keamanan dapat terjaga dan gejolak yang mungkin muncul di Kabupaten PPU harus bisa di deteksi dan ditangani secara cepat," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU)** :

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.

MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP





PROGRAM KALTIM CORPU, BPSDM LUNCURKAN PORTAL DIGITAL KISS



Tampilan Kanal YouTube BPSDM Kaltim (dari kiri), Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, M.AP, peneliti Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Rusli Cahyadi, Ph.D., dan Widyaswara BPSDM Kaltim, Yoyok Setyo Langgeng, M.Si.

BPSDM KALTIM GELAR SHARING SESSION UNTUK JAWAB TANTANGAN PEMBANGUNAN IKN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-42 dengan tema "Pembangunan IKN - Menimbang Peluang dan Tantangan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)" untuk ASN di lingkungan Provinsi Kaltim dan Luar Kaltim, Selasa (19/9) pukul 10.00 WITA - 12.00 WITA.

Kegiatan Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan acara ini juga disiarkan langsung dari kanal YouTube BPSDM Kaltim agar bisa disaksikan masyarakat umum.

Pada Sharing Session kali ini, menampilkan seorang narasumber dari peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), yakni Rusli Cahyadi, Ph.D. Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP, saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara, mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan Sharing Session dari tahun 2022 hingga September 2023, ini sudah yang ke-42.

"Alhamdulillah, kita konsisten meningkatkan pengetahuan ASN, salah satunya lewat Sharing Session ini, kita sudah mulai dari 2022 hingga 2023 ini," ujarnya.

Nina Dewi mengatakan strategi penataan ruang dalam Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mewujudkan sebagai kota yang aman, modern, produktif, dan sebagai simbol identitas bangsa Indonesia yang memi-

liki visi sebagai kota dunia dan bangun dengan konsep smart green beautiful, maka diperlukan sumber daya manusia ASN yang smart dan paham teknologi.

"Untuk mewujudkan IKN sebagai kota aman, modern, produktif, dan sebagai identitas, maka diperlukan sumber daya manusia ASN yang smart dan melek teknologi. ASN mampu beradaptasi dengan implikasi bisnis melalui penerapan ekosistem pemerintahan," katanya.

Nina Dewi juga berharap para peserta bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya, dan semoga para peserta mampu terus produktif bersama BPSDM membangun SDM khususnya di Kaltim.

"Ikuti acara ini dan serap ilmu sebaik-baiknya serta mampu mendukung kami dengan terus produktif dan turut membantu memajukan Kaltim CorpU yang sudah kita luncurkan," harapnya.

Dalam acara Sharing Session kali ini dimoderatori oleh Widyaswara BPSDM Kaltim, Yoyok Setyo Langgeng, M.Si. Acara ini sejak dibuka diikuti oleh 245 peserta dan hingga berita ini diterbitkan sudah diputar sebanyak 444 kali. Setiap peserta yang mengikuti melalui aplikasi Zoom akan diberikan sertifikat pelatihan secara gratis. (adv)

Pewarta: Hanaf

Editor: Agus Susanto



Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi dalam rangkaian Sharing Session BPSDM dari aplikasi ZOOM.

BPSDM AKAN GELAR SHARING SESSION ONLINE UNTUK UMUM, HADIRKAN PENELITI DARI BRIN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menggelar Sharing Session secara daring untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada hari Selasa (19/9/2023) besok.

Kali ini, sharing session tersebut menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube BPSDM Kaltim pada pukul 10.00 - 12.00 Wita.

Setiap peserta yang mengikuti kegiatan lewat aplikasi Zoom akan diberi-

kan sertifikat pelatihan.

Pada Sharing Session ke-42 yang bertema "Menimbang Peluang dan Tantangan Bagi ASN" akan menampilkan narasumber dari peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rusli Cahyadi, Phd

Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi M.AP, berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat menyerap materi yang disampaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menambah pengetahuan baru.(adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BPSDM Dra Nina Dewi dalam pembukaan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi efektif bagi tenaga kesehatan dan pelatihan hukum acara perdata dan hukum acara PTUN

Program Kaltim CorpU, BPSDM Luncurkan Portal Digital KISS

SAMARINDA - Demi men-
sukseskan program Kalimantan
Timur Korporat University (Kaltim
CorpU) ASN tangguh untuk In-
donesia, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Kaltim meluncurkan Portal Dig-
ital dengan nama Knowledge In-
tegrated Solution System (KISS).

Peluncuran KISS itu diperke-
nalkan oleh Kepala BPSDM
Kaltim, Nina Dewi saat men-
yampaikan pidato pembukaan
pelatihan pelayanan prima dan
komunikasi efektif bagi tenaga
kesehatan dan pelatihan hu-
kum acara perdata serta hu-
kum acara PTUN pada Selasa
(19/9/2023) di Aula Serbaguna
Hotel Fugo Samarinda.

"Kami telah meluncurkan pro-
gram Kaltim CorpU pada Jam-
bore Inovasi Kalimantan Agustus
lalu. Jadi melalui program Kaltim
CorpU ini kami membuat Por-
tal Digital KISS yang bisa diak-
ses melalui web resmi BPSDM

Kaltim," ungkap Kepala BPSDM
Kaltim Dra Nina Dewi MAP

Portal Digital KISS adalah lang-
kah awal dari program Kaltim
CorpU BPSDM Kaltim dalam
pengembangan SDM bagi ASN
di lingkungan Kaltim.

"KISS adalah portal digital
yang bisa digunakan sebagai
sarana manajemen pelatihan,
dan juga ada pelatihan secara
mandiri didalamnya, semua
model pembelajaran dan pela-
tihan ada di KISS. Kita bekerja
sama dengan webinar lembaga
non pemerintah yang bertujuan
untuk mengembangkan SDM
aparatur secara tepat, efektif
dan efisien," ungkapnya.

Diluncurkannya portal digital
KISS adalah untuk menjalankan
amanah Peraturan Pemerintah
No. 17 Tahun 2020 tentang Ma-
najemen PNS, pemenuhan hak
belajar 20 jam bagi ASN dan 25
Jam bagi PPPK untuk pengem-
bangan kompetensi ASN.

"Tindak lanjut apakah pe-
merintah daerah tidak me-
menuhi atau dikenalkan PP
17 2020 ini, pihak perangkat
daerah harus memperhatikan
kebutuhan ASN-nya, makan-
ya ayo apakah ada usulan soal
pelatihan yang dibutuhkan
oleh perangkat daerah bisa
disampaikan ke kita" ucapnya.

Untuk menyukseskan terwu-
judnya ASN yang berkualitas,
tentunya BPSDM tidak mampu
berjalan sendiri oleh sebab itu
harus ada dukungan dari perang-
kat-perangkat Daerah lainnya.

"Kita tidak bisa berjalan sendi-
ri, pastinya butuh dukungan
perangkat daerah dilingkungan
Kaltim, Oleh sebab itu melalui
Kaltim CorpU ini diharapkan kita
dapat melaksanakan betul-bet-
ul mengembangkan kapasitas
SDM sesuai kebutuhan," pung-
kasnya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP

PENTINGNYA TATA USAHA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN BLUD

SAMARINDA - Penatausahaan keuangan dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah salah satu aspek yang sangat penting. Utamanya, dalam proses penilaian pengelolaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian keuangan yang melibatkan dana publik.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Kalimantan Timur (Kaltim), Nina Dewi saat membuka acara Pelatihan Bendaharawan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) angkatan 1 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (18/9/2023) lalu di Gedung Serbaguna BPSDM Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

"Penata usahaan keuangan

yang BLUD merupakan landasan yang sangat penting untuk menjaga integritas keuangan dan operational BLUD serta untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Ini juga membantu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik," kata Nina Dewi.

Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan program belajar bagi tenaga pengelolaan keuangan, khususnya yang menduduki jabatan bendahara.

Pengeluaran pada lembaga Blud agar memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran APBD atau anggaran satuan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di akhir tanggapannya, Nina

berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya dan juga mengikuti pelatihan lain yang akan dilaksanakan BPSDM Provinsi Kaltim.

"Saya berharap para peserta tidak hanya sampai disini untuk mengembangkan diri, tapi terus proaktif mengikuti pelatihan BPSDM lainnya," tutupnya.

Diketahui dalam pelatihan ini, disampaikan materi-materi yang komprehensif dan relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh bendaharawan BLUD saat ini, dengan menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen keuangan publik peraturan terkait dan praktik terbaik yang dapat membantu peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. (adv)

Pewarta : Hanaf

Editor : Nicha Ratnasari


 PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BPSDM KALTIM

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR


 Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

 Dr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIM

 H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIM

 Dra. Nina Dewi
KEPALA DINAS BPSDM KALTIM


Sesi Foto bersama Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP, Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan keamanan Ririn Sari Dewi SIP MSi beserta undangan dan peserta pelatihan.

BPSDM KALTIM GELAR PELATIHAN PELAYANAN NAKES HINGGA PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ASN

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (19/9/2023) lalu, telah menggelar 2 pelatihan sekaligus. Yakni, Pelatihan Pelayanan Prima dan Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes). Selain itu, Pelatihan Hukum Acara dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Layanan Pendampingan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum di Lingkungan Pemkab/Pemkot dan Provinsi Kaltim.

Pelatihan yang digelar Ruang Serbaguna Lantai 5 Hotel Fugo Big Mall Samarinda tersebut, rencananya akan digelar selama 5 hari, mulai 19 – 24 September 2023.

Kepala BPSDM Dra Nina Dewi sangat berharap dukungan seluruh perangkat daerah dalam menjamin kualitas SDM para ASN yang bekerja di instansi pemerintah.

“Kami berharap kerjasamanya agar semua kualitas ASN kita lebih berkualitas. Jadi petakan kebutuhan ASN kita agar tercapai kebutuhan waktu pelajaran ASN, karena tujuan peningkatan kualitas ASN tidak akan

tercapai jika tidak ada dukungan semua perangkat daerah,” tegasnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan Keamanan Ririn Sari Dewi SIP MSi, memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan.

Hadir sekaligus membuka acara Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan Keamanan, Ririn Sari Dewi yang sangat menyambut baik program pelatihan ini.

“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kedua pelatihan ini. Ini merupakan komponen yang sangat baik dan bisa menciptakan tatanan hukum yang lebih baik pelayanan kesehatan yang lebih efisien di wilayah kita,” katanya.

Ririn juga berharap semua peserta bisa mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh agar mampu mengaplikasikannya keilmuannya yang telah didapat dari pelatihan.

“Ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh agar nanti bisa diaplikasikan dengan baik, dan atas izin Allah, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan dengan ini acara pelatihan secara resmi saya buka,” tutupnya. **(adv)**

TERDEPAN DALAM BERITA



15,3 KILOGRAM SABU-SABU ASAL MALAYSIA DIGAGALKAN

BACA HALAMAN 2-4



GELAR PERKARA SOAL KEMATIAN WALPRI, POLDA PERIKSA 14 ORANG SAKSI

BACA HALAMAN 8



ADE/MKR

Suasana press release kegagalan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di Mako Satrol Lantamal XIII Tarakan.

Penyelundupan 15,3 Kilogram Sabu-Sabu Digagalkan

Satu Pelaku Warga Malaysia Diamankan

TARAKAN - Penyelundupan narkoba melalui jalur laut berhasil digagalkan Lantamal XIII Tarakan bersama Bea Cukai dan BNNP Kaltara. Diketahui, sabu-sabu seberat 15,3 kilogram yang dikemas dalam bungkus teh Tiongkok berhasil diamankan.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI Deni Herman mengatakan, kasus peredaran barang haram itu terungkap dari informasi intelijen BNN Tarakan, Bea Cukai Tarakan dan tim Intel Lantamal XIII bahwa adanya kegiatan ship to ship narkoba jenis sabu-sabu dari Tawau, Malaysia di sekitar perairan selatan Tarakan dan utara Pulau Keciak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara.

“Kemudian kami melakukan koordinasi untuk melakukan operasi

penangkapan,” ucapnya di halaman Mako Satrol Lantamal XIII di Jalan Yos Sudarso, Sebengkok AL -Tarakan, Senin (25/9/2023).

Selanjutnya, pada Kamis (21/9/2023) sekira pukul 07.00 Wita, tim gabungan mendeteksi adanya kegiatan transfer sabu-sabu dari SB Banua Guci ke Kapal Tomaisi 257. “Tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap speedboat dan kapal kayu tersebut dan mendapati 15 paket sabu,” terangnya.

Deni mengungkapkan, ada dua sarana yang digunakan pelaku dalam mengedarkan barang haram tersebut. Yakni speedboat SB Banua Tengah yang diawaki tiga orang dan empat orang menggunakan Kapal Tomaisi 257.

“Informasinya speedboat membawa barang bukti, Kapal Tomaisi

ini untuk menjemput. Jadi nanti ada pertemuan di perairan atau ship to ship,” katanya.

Dari pengungkapan kasus ini, tim gabungan berhasil menyita sabu-sabu seberat 15,3 kg yang disamarkan melalui bungkus teh Tiongkok dan membekuk tujuh orang, yakni MG, P, S, SH, MJ, SP, dan ZM. “Satu di antaranya merupakan warga Malaysia. Dan 7 pelaku ini statusnya masih yang terperiksa,” sebutnya.

Dia menambahkan, sabu-sabu berasal dari Tawau yang rencananya akan dibawa menuju Sulawesi Barat. “Saat ini, kasus dialami BNNP Kaltara. Siapa kurirnya, masih didalami,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Para pelaku penyelundupan sabu-sabu seberat 15,3 kilogram dari Malaysia.

Fakta Gagalnya Penyelundupan Sabu Seberat 15,3 Kg dari Malaysia

TARAKAN – Lantamal XIII dengan BNNP Kalimantan Utara dan Bea Cukai Kota Tarakan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 15,3 Kg di Pulau Keciak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Tim gabungan berhasil menangkap dan mengamankan 1 Speed Banua Tengah Guci dengan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah tiga orang, serta 1 Kapal Kayu Tomaissi 257 dengan ABK empat orang.

Dari pengungkapan kasus ini, sejumlah fakta-fakta terungkap yang tentunya menarik untuk disimak. Dirangkum MediaKaltimtara.com, Senin (25/9/2023), berikut fakta-fakta terbongkarnya penyelundupan sabu seberat 15,3 kg dari Tawau Malaysia.

1. Berhasil Selamatkan 300.000 Generasi Bangsa

Gagalnya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 15,3 Kg berhasil menyelamatkan 300.000 generasi bangsa. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL

(Danlantamal) XIII Laksamana Pertama TNI Deni Herman dalam press release, Senin (25/9/2023).

“Apabila 15,3 kg sabu tersebut beredar di masyarakat. Anggap saja 1 gram digunakan untuk 4 atau 5 orang, maka dengan itu ada sekitar 300.000 pengguna. Artinya pengungkapan kasus ini menyelamatkan banyak generasi bangsa,” ucapnya.

Kedepan, kata Deni, Lantamal XIII akan terus meningkatkan intensitas patroli bersama dengan stakeholder lainnya guna mencegah dan meminimalisir kegiatan ilegal yang kerap terjadi di wilayah perbatasan.

2. Sabu Dibungkus dengan Kemasan Teh Cina Bertuliskan Very Good

Sabu seberat 15,3 kg yang berhasil digagalkan tim gabungan dikemas dengan kemasan teh Cina bertuliskan very good. Beberapa kali model sabu seperti ini sudah berhasil diungkap, salah satunya diungkap BNNP Kaltara, pada (12/5/2022) lalu.

Pada saat itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara menetapkan tersangka inisial UB pasca

ditangkap di Desa Kujau, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Diketahui dari tangan tersangka didapatkan 22 bungkus plastik bening bertuliskan very good berisi kristal putih di duga narkotika Gol 1 Jenis Sabu-Sabu dengan berat 22 kg.

3. Sabu Merupakan Jaringan Malaysia

Kepala BNNP Kalimantan Utara Brigjen Pol Rudi Hartono mengatakan sabu 15,3 kg merupakan jaringan Malaysia. Namun, dia belum memastikan apakah produksinya berasal dari negara tersebut.

Rudi menegaskan, dari 7 pelaku tersebut tidak ada yang berasal jaringan Lapas. 7 pelaku ini juga, kata dia, belum pernah tertangkap sehingga tidak termasuk dalam DPO. Saat ini, pihaknya sedang mendalami kasus ini untuk mengembangkan apakah ada keterlibatan pihak lain yang lebih besar.

4. Barang Bukti Sabu Sempat Dibuang

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) XIII Laksamana Pertama TNI Deni Herman menga-

takan barang bukti sabu sempat dibuang ke laut oleh pelaku namun berhasil digagalkan oleh tim gabungan.

Selain itu, terungkap pula melalui Kepala BNNP Kalimantan Utara Brigjen Pol Rudi Hartono bahwa penangkapan ini sudah lima kali gagal. Tim gabungan, kata dia, sudah 8 hari bergerak mengintai pelaku untuk mengungkap kasus ini.

Dia menyebut kendala dalam pengungkapan penyelundupan sabu di laut adalah wilayah cakupan yang cukup luas. Terlebih jika dilakukan di tengah laut, akan terkendala komunikasi, cuaca, dan lain sebagainya.

5. 7 Pelaku Diamankan, Berkedok Sebagai Pemancing Rawai

Ada 7 orang yang diamankan dalam kasus ini yakni MG, P, S, SH, MJ, SP, dan ZM. Satu di antaranya yakni ZM merupakan warga Malaysia. Dalam mengedarkan sabu tersebut, pelaku

menyamar sebagai pemancing rawai menggunakan kapal Tomaisi 257, yang berasal dari Sulawesi Barat.

Kronologis diawali dengan adanya informasi intelijen bahwa akan dilakukan kegiatan ship to ship narkoba jenis sabu asal Tawau Malaysia di perairan sekitar Pulau Keciak. Kemudian, pada Rabu (20/09/2023) pukul 18.30 Wita, Tim SFQR Lantamal XIII, Tim Intel Lantamal XIII, BNN Tarakan dan Bea Cukai Tarakan melaksanakan konsolidasi pergerakan dengan membagi menjadi 2 (dua) tim laut, yang selanjutnya pada pukul 19.00 sampai dengan 06.30 Wita dini hari Kamis (21/09/2023) kedua tim tersebut bergerak menuju posisi perairan sekitar Pulau Keciak dan melaksanakan pengendalian.

Selama melaksanakan pengintaian terhadap target dan setelah dilakukan serah terima barang dari speed-

boat ke kapal kayu, tim gabungan berhasil mengamankan kapal kayu yang berisi 4 orang dan barang bukti sejumlah 15 paket seberat 15,3 Kg jenis sabu-sabu. Selain itu, tim gabungan juga mengejar dan berhasil mengamankan speedboat bersama 3 ABK di dalamnya.

Adapun pada pukul 09.30 Wita tim gabungan bersama pelaku, speedboat, kapal kayu dan barang bukti tiba di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kaltara untuk dilakukan pendalaman, serta pemeriksaan lebih. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Barang bukti sabu-sabu di dalam kemasan teh Cina bertuliskan Very Good.



Dispusip Berau Luncurkan 50 Kamus Bahasa Barrau

TANJUNG REDEB – Guna melestarikan budaya lokal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau meluncurkan Kamus Bahasa Barrau.

Kepala Dispusip Berau, Yudha Budi Santosa mengatakan, Kamus Bahasa Barrau terbit perdana pada tahun 2023 ini.

“Tidak kami launching secara khusus, tetapi secara simbolis yang kami serahkan ke Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda serta beberapa tokoh masyarakat Berau,” ungkapnya, Senin (25/9/2023).

Dia menyebut, peluncuran Kamus Bahasa Barrau itu bertujuan untuk melestarikan dan menyebarluaskan penggunaan Bahasa Barrau. “Sehingga makin banyak penutur Bahasa Berau dan bisa menjadi penggunaan bahasa sehari-hari,” katanya.

Yudha menjelaskan, Kamus Bahasa Barrau tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau. “Jadi sifatnya tidak ada bekerjasama dengan pihak lain,” imbuhnya.

Kamus Bahasa Barrau merupakan kamus yang pertama kali diterbitkan Dispusip Berau. Diketahui, anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 10 juta rupiah.

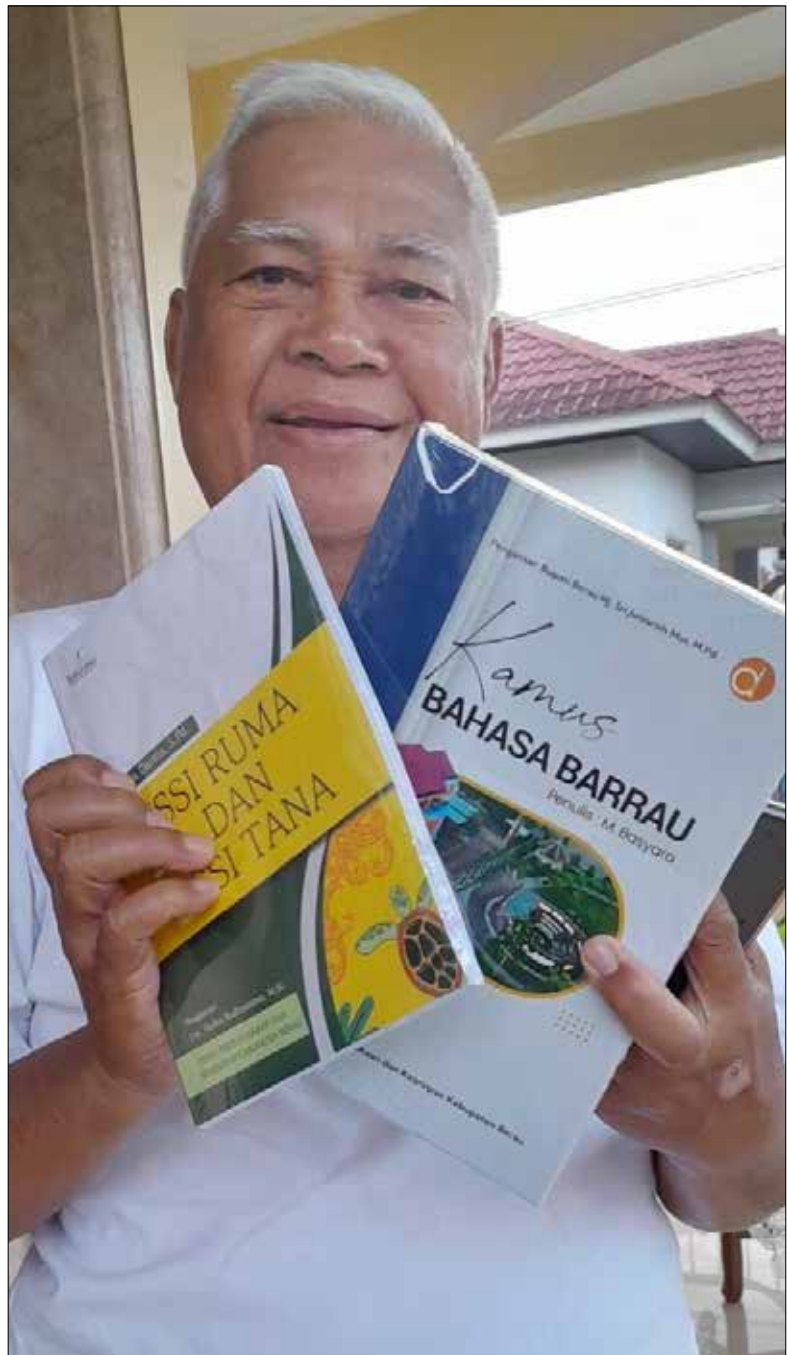
“Cetakan pertama ini ada 50 eksampler. Anggarannya melalui APBD,” tuturnya.

Disebutkannya, untuk saat ini Kamus Bahasa Barrau belum disebar ke perpustakaan kampung dan sekolah. Tetapi, kata Yudha, jika antusias masyarakat tinggi, maka tidak menutup kemungkinan jumlah cetakan Kamus Bahasa Barrau ditingkatkan.

“Tetapi kami lapor ke Bupati terlebih dahulu untuk mengajukan cetak ulang dan dievaluasi,” jelasnya.

Kendati demikian, Yudha Budi Santosa berharap kedepannya Bahasa Barrau menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan semakin banyak penuturnya.

“Apalagi saat ini sudah sedikit yang menggunakan Bahasa Barrau dalam kehidupan sehari-hari, semoga bisa digunakan sebagai bahasa pengantar dan tetap lestari,” tandasnya. (adv/and)



Kamus Bahasa Barrau yang diluncurkan Dispusip Berau.



MARTINUS/MKR

Ketua Bawaslu Bulungan Dwi Suprpto, tugaskan Panwascam dan PKD untuk inventarisir alat peraga sosialisasi.

Tugaskan Panwascam dan PKD, Inventarisir Alat Peraga Sosialisasi

TANJUNG SELOR - Bawaslu Bulungan menugaskan Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di seluruh wilayah Bulungan.

Penugasan itu berdasarkan Surat Nomor 212/PM.00.02/K.KL-01/09/2023. Menugaskan seluruh Panwascam dan PKD se-Kabupaten Bulungan, untuk melakukan inventarisir alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Kecamatan Masing-masing.

Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprpto saat dikonfirmasi menyampaikan, penugasan untuk melakukan inventarisir alat peraga sosialisasi, dimulai pada 23-25 September 2023.

“Kita minta Panwascam dan PKD,

untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan dan menyampaikan hasilnya kepada Bawaslu Bulungan,” ucap Dwi Suprpto, kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

Dia membeberkan, dasar regulasi dikeluarkan surat tugas untuk menginventarisir alat peraga sosialisasi dimaksud, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

Kemudian, Perbawaslu Nomor 3 tahun 2022, tentang tata cara dan pola hubungan pengawas pemilihan umum. Selanjutnya, perbawaslu

Nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Serta, Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022, tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Selanjutnya, Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye, sebagaimana telah diubah dengan perbawaslu nomor 33 tahun 2018.

Dan terakhir, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023, tentang kampanye pemilihan umum. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Tinjauan dari udara oleh wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan dan memantau langsung kondisi rill di lapangan.

Banjir Beberapa Waktu Lalu di Malinau, Hampir 80 Persen Desa Tergenang

MALINAU - Banjir Di Kabupaten Malinau, telah merendam hampir 80 persen kawasan Desa dari total 109 Desa yang ada. Dampaknya, menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, bahkan ada yang sampai kehilangan tempat tinggal.

Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, saat melakukan tinjauan beberapa waktu lalu berujar, pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten mesti bersama-sama membantu masyarakat Malinau yang terdampak.

Melihat kondisi yang ada, kata dia pemerintah sudah sepatutnya harus eksekusi bergerak langsung ke lapangan, tidak hanya sebatas tinjau. Selain pemukiman dan rumah warga yang terendam, jembatan gantung menuju Desa Paking juga ikut hanyut.

“Ini harus diambil sikap bersama,

mulai dari pemerintah Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten,” ujar Yansen, baru-baru ini.

Selain itu, kepada masyarakat Malinau utamanya Desa yang terdampak, wagub minta untuk tetap waspada. Dan antisipasi segala kemungkinan yang terjadi, dengan tetap harus ke depan keselamatan.

“Kalau 80 persen kawasan desa yang terendam, maka ini merupakan banjir terbesar kedua setelah tahun 1997,” tuturnya.

Namun, pada waktu itu (tahun 1997 red) drainase belum di bangun termasuk dengan siring sungai. Sehingga, air dengan leluasa naik ke kawasan pemukiman, tapi kondisi yang terjadi saat ini itu semua telah dibangun termasuk drainase yang telah dibenahi.

Selanjutnya, wagub Yansen juga

berkesempatan untuk mengunjungi beberapa posko pengungsi, bagi warga terdampak dan memberikan beberapa bantuan untuk kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, seorang warga asal Malinau (Rifan) saat dikonfirmasi menyampaikan kondisi terkini hari ini, air sudah mulai surut dan aktivitas masyarakat kembali dijalankan secara normal. Kemudian, membersihkan rumah dan seisinya usai diredam banjir.

“Iya, Puji Tuhan kondisi air saat ini sudah mulai surut. Terpantau, masyarakat mulai melangsungkan rutinitas sehari-hari setelah membersihkan rumah masing-masing,” tutupnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Press release soal kematian Brigpol Setyo Herlambang.

Gelar Perkara Soal Kematian Walpri, Polda Kaltara Periksa 14 Orang Saksi

TANJUNG SELOR - Kematian Brigpol Setyo Herlambang mulai menemukan titik terang. Hasil gelar perkara pada Senin (25/9/2023), tidak ditemukan unsur pidana tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya, beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat mengatakan, pihaknya telah memeriksa 14 saksi yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Perkara (BAP). Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan layar Closed Circuit Television (CCTV) di tempat kejadian perkara (TKP).

"Kemarin (Minggu, 24 September 2023) juga sudah dilakukan gelar perkara. Sekira pukul 09.00-14.00 Wita," ucapnya.

Hasil pemeriksaan CCTV, lanjutnya, korban masih beraktivitas normal keluar masuk dari kamarnya hingga masuk lewat posko penjagaan. Bahkan, anggota penjagaan sempat mendatangi Brigpol Setyo Herlambang untuk meminjam sandal.

"Izin bang, pinjam sandal," ujar Budi menirukan percakapan saksi dengan korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV di bagian depan, terpantau aktivitas korban mulai dari pagi hingga siang hari. Hingga korban ditemukan meninggal dunia di kamar pengawal

pribadi (Walpri) Kapolda Kaltara.

Lalu rekaman CCTV di samping kamar, memperlihatkan proyektil peluru saat meletus mengenai jendela. Tepatnya pukul 12.39,38. Hanya saja, waktu yang tertera di CCTV dengan durasi jam biasa berbeda, selisih sekira 20 menit.

"Dalam kamar, korban hanya seorang diri. Tidak ada orang lain lain," ungkapnya.

Sementara hasil gelar perkara disimpulkan tidak ditemukan adanya unsur pidana. Pun barang bukti yang telah diamankan, yakni CCTV beserta perangkatnya, pakaian dan senjata api milik Brigpol Setyo Herlambang yang akan dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri di Jakarta atau Surabaya.

"Nanti ahli forensik yang akan menyampaikan hasilnya," katanya.

Suara Tembakan Tidak Terdengar Saksi yang menemukan pertama Walpri Kapolda Kaltara, Brigpol Setyo Herlambang berinisial Briptu K pada pukul 12.39,38 sesuai rekaman CCTV. Saat itu, saksi memotret makanan yang disantapnya untuk dikirim ke korban. Tapi tidak jadi, dan langsung mendatangi korban ke kamarnya.

Ketika membuka pintu kamar, saksi dikejutkan dengan kondisi Brigpol Setyo Herlambang sudah terkapar bersimbah darah. Kemudian bergegas menghubungi Biddokkes,

Sripim dan penjaga piket.

"Biddokkes sempat melakukan upaya penyelamatan dan melakukan pengecekan. Alhasil, tidak ada detak jantung dan denyut nadi di leher sehingga disimpulkan korban sudah meninggal dunia," ucap Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat.

Dari kejadian ini, tidak ada satupun yang mendengar suara ledakan. Tapi dari rekaman CCTV, terlihat proyektil peluru lewat jendela. Sehingga asumsi awal soal kelalaian penggunaan senjata. "Tapi masih asumsi, tergantung hasil pemeriksaan nantinya," jelas Budi.

Terkait pembersihan senjata, kata Budi, korban merupakan orang yang terlatih dan paham akan standar operasional prosedur (SOP). Pasalnya korban sebelumnya bertugas sebagai Banit 3 Subden 1 Den Gegana Sat Bri-mob Polda Kaltara.

"Saat kejadian, korban tengah lepas dinas," sebutnya.

Proyektil peluru saat ini belum ditemukan, serta beberapa barang bukti masih dilakukan pendalaman. Saat ini tengah disinkronkan dari keterangan 14 saksi, bukti CCTV dan bukti pendukung lainnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika